



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

TAHUN 2021 - 2026



DISUSUN OLEH:

**BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah, SWT, atas rahmat dan karunia-Nya yang tak ternilai, sehingga Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan dan menghasilkan sebuah dokumen sebagai acuan pelaksanaan pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan Tahun 2026. Renstra ini disusun mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 dan juga dibuat berdasarkan hasil capaian dan pelaksanaan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau periode sebelumnya (2016-2021).

Secara garis besar Renstra ini berisi tentang tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan beserta seluruh indikator kinerjanya di biro-biro yang berada di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau baik berupa outcome maupun output termasuk pagu indikatif pendanaannya.

Kami menyadari dalam penyusunan dokumen ini masih terdapat banyak kekurangan, meskipun demikian kami juga menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan dokumen Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 ini, semoga bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau pada umumnya dan dalam meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, kuat dan antisipatif di masa yang akan datang.

Tanjungpinang, Oktober 2021
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Ir. LAMIDI, M.M



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A Latar Belakang	1
B Landasan Hukum	5
C Maksud dan Tujuan.....	8
D Sistematika Penulisan.....	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN	11
A Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	11
B Sumber Daya Perangkat Daerah	19
C Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	27
D Anggaran dan Realisasi Anggaran Pelayanan Perangkat Daerah	32
E Peluang dan Tantangan Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	34
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI	36
A Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah	37
B Telaah Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Terkait dengan Tugas dan Fungsi Pelayanan ...	40
C Telaah Renstra Kementerian/Lembaga Sejenis	46
D Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	59
E Penentuan Isu-isu Strategis.....	61
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	63
A Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	63
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	72
A Strategi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	72
B Arah Kebijakan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	73
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF	77



BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	110
A	Indikator Kinerja Perangkat Daerah Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	110
B	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	111
BAB VIII	PENUTUP	117
A	Pedoman Transisi.....	118
B	Kaidah Pelaksanaan.....	119



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, tertib, akuntabel, profesional dan bertanggungjawab yang tercermin dari sosok dan perilaku birokrasi yang efisien dan efektif serta mampu memberikan pelayanan yang menyeluruh kepada segenap masyarakat merupakan sasaran dari penyelenggaraan pemerintahan daerah. Di pihak yang lain, arah kebijakan pembangunan di bidang aparatur negara, salah satunya adalah penuntasan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk praktek-praktek kolusi, korupsi dan nepotisme, melalui implementasi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) pada semua jenjang dan lini pemerintahan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan daerah yang memuat visi, misi, arah kebijakan, serta program Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dokumen tersebut menjadi komitmen Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan yang telah dicanangkan dalam *political planning* Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah yang tidak terpisahkan dengan dokumen RPJMD. Dalam penyusunannya Renstra Perangkat Daerah melewati beberapa tahapan-tahapan seperti persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir dan penetapan Renstra, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara



Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Kemudian dokumen Renstra Perangkat Daerah dievaluasi dan dikendalikan untuk mendapatkan kesesuaian dengan dokumen RPJMD. Dokumen Renstra Perangkat Daerah disusun dengan mengacu kepada RPJMD yang sudah ditetapkan dengan peraturan daerah.

Dokumen Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026 disusun untuk menjabarkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang memuat tugas pokok dan fungsi, gambaran kondisi capaian kinerja dan hasil kinerja yang ingin dicapai serta program, kegiatan dan sub kegiatan pokok yang bersifat indikatif.

Dalam paradigma penyelenggaraan pemerintahan melahirkan tuntutan perubahan yang dikenal dengan *good governance*. Tuntutan tersebut disatu sisi merupakan hal yang wajar dan harus terjadi seiring berkembangnya aspirasi, tumbuhnya kesadaran untuk menjadi lebih baik serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang disisi lain melahirkan konsekuensi untuk melakukan berbagai perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

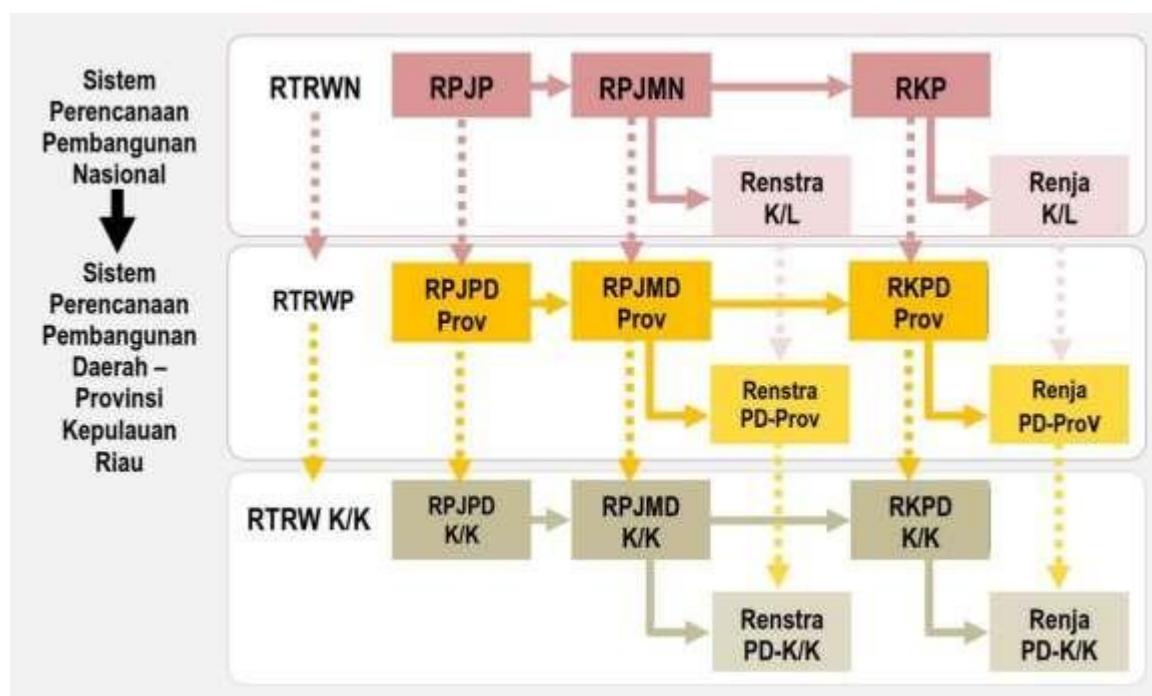
Berdasarkan pada paradigma tersebut maka fungsi koordinasi Pemerintah Daerah harus direncanakan secara tepat, cermat, professional, terpadu dan berkesinambungan. Oleh karena itu Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebagai Perangkat Daerah penyelenggara urusan penunjang dan fungsi koordinasi, pemantauan serta evaluasi kebijakan daerah wajib menyusun Renstra untuk 5 (lima) tahun ke depan dalam suatu dokumen Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026.

Dokumen Renstra ini disusun dengan mengacu, merujuk, mempedomani, dan memperhatikan dokumen RPJMD Provinsi Kepulauan Riau yang telah ditetapkan termasuk merujuk pada dokumen perencanaan lainnya seperti Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia termasuk 7 (tujuh) Agenda Pembangunan Kabinet



Indonesia Maju, RPJPD Provinsi Kepulauan Riau 2005-2025, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini dimaksudkan agar proses penyusunan dokumen Renstra ini dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang lebih sinergis dan lebih terpadu baik dalam aspek kewilayahan maupun aspek sektoral dengan harapan agar dalam implementasinya diperoleh hasil yang tepat dan terarah. Dokumen Renstra ini juga merupakan penjabaran visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD Provinsi Kepulauan Riau 2021-2026. Selanjutnya dokumen ini ini digunakan sebagai landasan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau mulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2026.

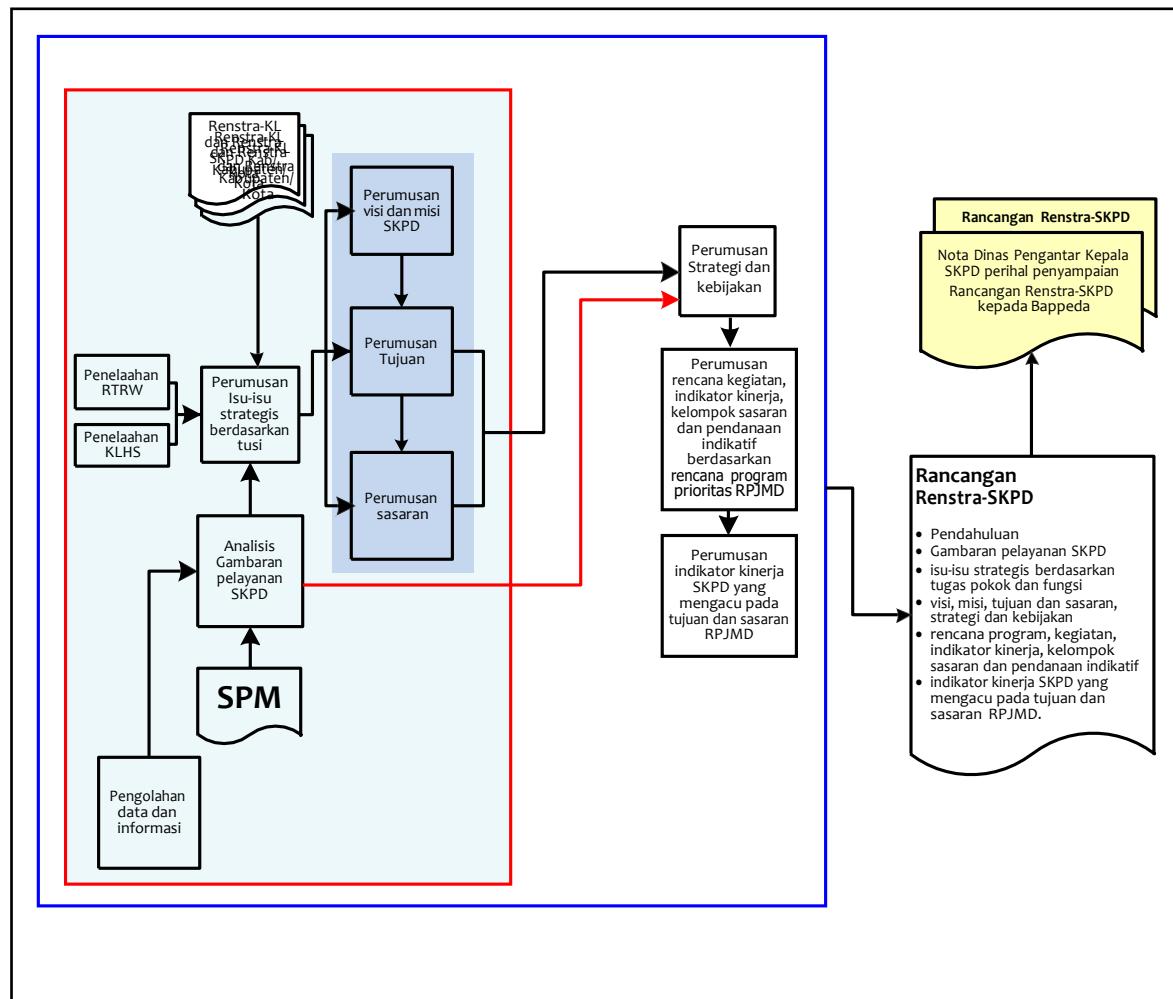
Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, Renstra Sekretariat Daerah memiliki hubungan dan keterkaitan yang erat dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya terutama RPJPN, RPJMN, RTRWN, RKP, Renstra Kementerian/Lembaga, RPJPD, RTRWP, RPJMD, RKPD dan Renja Perangkat Daerah. Hubungan antar dokumen pembangunan tersebut, dapat dilihat dalam gambar di bawah ini:



Gambar 1.1.
Keterkaitan dan Hubungan antara Dokumen Renstra dengan
Dokumen Perencanaan Lainnya



Rancangan Awal Rencana Strategis Perangkat Provinsi Kepri merupakan bahan dalam penyusunan RPJMD Provinsi Kepri, setelah RPJMD ditetapkan selanjutnya dijadikan pedoman untuk penyempurnaan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah. Setelah ditetapkan selanjutnya Renstra tersebut ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur. Tahapan penyusunan rancangan Renstra Sekretariat Daerah dapat digambarkan dalam bagan alir di bawah ini:



Gambar 1.2
Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Bertitik tolak dari hal tersebut di atas, penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026 merupakan pemenuhan kebutuhan aspek perencanaan kebijakan pelaksanaan tugas yang matang melalui proses koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi dengan Perangkat Daerah terkait di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau serta Pemerintah Pusat. Penyusunan Renstra



ini juga mempertimbangkan aspek tuntutan dan kebutuhan program pembangunan daerah, termasuk tuntutan dan aspirasi yang berkembang pada saat ini, yang merupakan faktor eksternal lingkungan organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

B. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang



- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaran Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 3);
 14. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja



- Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) *juncto* Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaran Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 16);
 21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2);
 22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 17);



23. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 41);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 54);
26. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 Nomor 580).

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renstra ini adalah sebagai penjabaran RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021, khususnya pada fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat, yang memuat tugas pokok dan fungsi organisasi, gambaran kondisi capaian kinerja dan hasil kinerja yang ingin dicapai serta program, kegiatan dan sub kegiatan pokok yang bersifat indikatif.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra ini adalah:

1. Mengetahui hasil pelaksanaan dan evaluasi kinerja Sekretariat Daerah periode sebelumnya (tahun 2016-2021);
2. Memberikan arah dan panduan dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pembangunan tahunan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah;
3. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah termasuk melaksanakan kebijakan berdasarkan tema pembangunan pertahun pada RPJMD;



4. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2021-2026;
5. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan/Perjanjian Kinerja di lingkungan Sekretariat Daerah; dan
6. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Renstra ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab I berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, hubungan rencana strategis dengan dokumen perencanaan lainnya dan sistematika penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN

Bab II berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, anggaran dan realisasi anggaran pelayanan serta peluang dan tantangan pengembangan pelayanan Sekretariat Daerah.

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bab III berisi tentang isu-isu strategis yang akan dihadapi dan harus ditangani Sekretariat Daerah. Isu-isu strategis ini mengacu pada identifikasi permasalahan, mandat yang diberikan oleh Kepala Daerah melalui visi dan misi melalui RPJMD Provinsi Kepulauan Riau 2021-2026.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Bab IV menguraikan tentang perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah (lima tahun) Sekretariat Daerah.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab V menguraikan tentang strategi dan arah kebijakan Sekretariat Daerah. Strategi dan arah kebijakan ini menjadi jalur dan rambu-rambu agar upaya pencapaian sasaran menjadi lebih berhasil.



BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab VI menguraikan tentang rencana program dan kegiatan untuk mencapai sasaran, melaksanakan misi, dan mewujudkan visi. Rencana program dan kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab VII menguraikan tentang keterkaitan antara Renstra Sekretariat Daerah dan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau. Keterkaitan ini ada dalam bentuk indikator kinerja yang mengacu (memiliki korelasi) dengan tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII. PENUTUP

Bab VIII menguraikan tentang kaidah pelaksanaan dan harapan untuk keberhasilan implementasi dokumen rencana strategis Sekretariat Daerah yang telah tersusun.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

1. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah

Struktur Organisasi Tata Kelola Pemerintahan untuk Sekretariat Daerah dituangkan pada Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, sementara Tugas Pokok dan Fungsi dituangkan sesuai Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Tugas pokok Sekretariat Daerah adalah membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan fungsi:

1. pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
2. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
3. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
4. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

2. Struktur Organisasi Sekretariat Daerah

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terdiri dari:

1. Sekretaris Daerah;
2. Staf Ahli yang terdiri dari:



- Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Hukum;
- Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
- Staf Ahli Bidang Sosial, Kesejahteraan Rakyat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Adapun tugas staf ahli tersebut adalah membantu Gubernur dalam hal memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Asisten

Asisten terdiri dari Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, dan Asisten Administrasi Umum.

a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan biro pemerintahan dan perbatasan, biro hukum dan biro kesejahteraan rakyat serta SKPD sesuai dengan pembidangan tugas Asisten Pemerintahan. Adapun Biro yang langsung berada dibawah Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat antar lain:

- ❖ Biro Pemerintahan dan Perbatasan, yang membawahi:
 - Bagian Pemerintahan terdiri dari:
 - Sub Bagian Tata Usaha;
 - Sub Bagian Koordinasi Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
 - Sub Bagian Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan.
 - Bagian Pengelolaan Perbatasan terdiri dari:
 - Sub Bagian Perbatasan antar Negara;
 - Sub Bagian Perbatasan antar Daerah; dan
 - Sub Bagian Tata Usaha.
 - Bagian Otonomi Daerah terdiri dari:
 - Sub Bagian Administrasi Aparatur Kepala Daerah dan Legislatif;



- Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah; dan
 - Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- ❖ Biro Hukum, yang membawahi:
- Bagian Peraturan Perundang-Undangan terdiri dari:
 - Sub Bagian Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - Sub Bagian Penyusunan Keputusan Kepala Daerah dan Naskah Hukum; dan
 - Sub Bagian Dokumentasi Hukum dan Tata Usaha.
- Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota terdiri dari:
 - Sub Bagian Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
 - Sub Bagian Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Kabupaten/Kota; dan
 - Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum Kabupaten/Kota.
- Bagian Bantuan Hukum dan HAM terdiri dari:
 - Sub Bagian Bantuan Hukum;
 - Sub Bagian Hak Asasi Manusia; dan
 - Sub Bagian Penyuluhan Hukum.
- ❖ Biro Kesejahteraan Rakyat, yang membawahi:
- Bagian Keagamaan terdiri dari:
 - Sub Bagian Keagamaan dan Pembinaan Kehidupan Umat Beragama;
 - Sub Bagian Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
 - Sub Bagian Pendataan, Monitoring dan Evaluasi Keagamaan.
- Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kesehatan dan Sosial terdiri dari:
 - Sub Bagian Pendidikan, Kebudayaan dan Perpustakaan;



- Sub Bagian Kesehatan dan Sosial; dan
 - Sub Bagian Tata Usaha.
- Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olah Raga terdiri dari:
- Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - Sub Bagian Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan;
 - Sub Bagian Kepemudaan dan Olah Raga.
- b. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan melaksanakan tugas membantu sekretaris daerah dalam perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan program, pelayanan administrasi, pemantauan, dan evaluasi terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang administrasi perekonomian, layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah dan administrasi pembangunan. Adapun Biro yang langsung berada dibawah Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan antar lain:
- ❖ Biro Administrasi Perekonomian, yang membawahi:
- Bagian Produksi dan Distribusi terdiri dari:
 - Sub Bagian Koordinasi Urusan Pertanian, Pangan, Perikanan dan Kelautan;
 - Sub Bagian Koordinasi Urusan Industri, Perdagangan; dan
 - Sub Bagian Koordinasi Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral.
 - Bagian Umum dan Sinkronisasi Urusan terdiri dari:
 - Sub Bagian Koordinasi Urusan Kominfo, Persandian dan Statistik;
 - Sub Bagian Koordinasi Urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
 - Sub Bagian Tata Usaha.
 - Bagian Sarana Pengembangan Perekonomian terdiri dari:
 - Sub Bagian Koordinasi Urusan Pariwisata, Koperasi dan UMKM;



- Sub Bagian Pembinaan BUMD dan Lembaga Ekonomi; dan
 - Sub Bagian Koordinasi Urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Penanaman Modal dan PTSP.
- ❖ Biro Pengadaan Barang/Jasa, yang membawahi:
- Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari:
 - Sub Bagian Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang/Jasa;
 - Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa.
 - Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari;
 - Sub Bagian Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa;
 - Sub Bagian Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa dan Tata Usaha Biro; dan
 - Sub Bagian Pendampingan, Konsultasi dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa.
 - Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik terdiri dari:
 - Sub Bagian Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik;
 - Sub Bagian Pengembangan Sistem Informasi; dan
 - Sub Bagian Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang/Jasa.
- ❖ Biro Administrasi Pembangunan, yang membawahi:
- Bagian Administrasi dan Perencanaan Program terdiri dari:
 - Sub Bagian Perencanaan Program;
 - Sub Bagian Pengembangan Kebijakan Program; dan
 - Sub Bagian Tata Usaha.
 - Bagian Administrasi Pelaksanaan dan Kebijakan Pembangunan terdiri dari:
 - Sub Bagian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan;



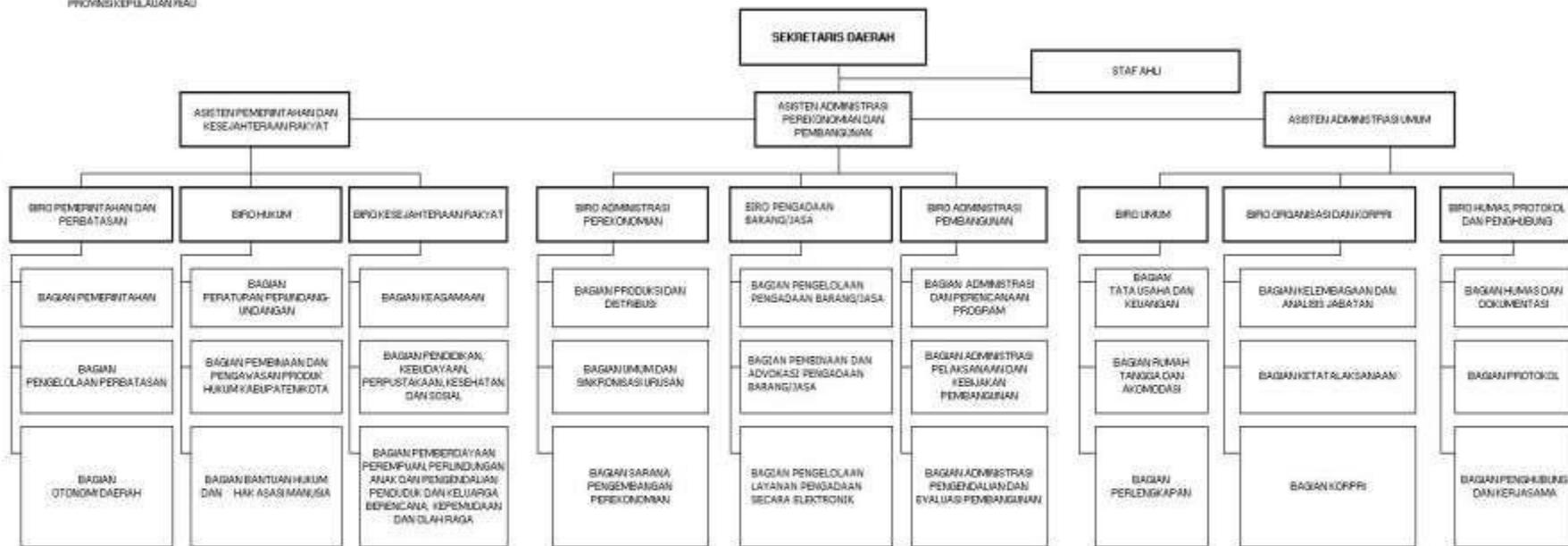
- Sub Bagian Kebijakan Pelaksanaan Pembangunan; dan
 - Sub Bagian Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan E-Government.
- Bagian Administrasi Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan terdiri dari:
- Sub Bagian Pengendalian dan Evaluasi APBD;
 - Sub Bagian Pengendalian dan Evaluasi APBN; dan
 - Sub Bagian Pelaporan Pembangunan.
- c. Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu sekretaris daerah dalam perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan program, pelayanan administrasi, pemantauan, dan evaluasi terkait dengan pembinaan kelembagaan perangkat daerah, ketatalaksanaan, keprotokolan dan penghubung, serta dukungan penyelenggaraan pemeritahan daerah oleh sekretariat daerah. Adapun Biro yang langsung berada dibawah Asisten Administrasi Umum antara lain:
- ❖ Biro Umum, yang membawahi:
- Bagian Tata Usaha dan Keuangan terdiri dari:
- Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan;
 - Sub Bagian Tata Usaha Biro; dan
 - Sub Bagian Keuangan.
- Bagian Rumah Tangga dan Akomodasi terdiri dari:
- Sub Bagian Rumah Tangga Gubernur;
 - Sub Bagian Rumah Tangga Wakil Gubernur; dan
 - Sub Bagian Akomodasi dan Transportasi.
- Bagian Perlengkapan terdiri dari:
- Sub Bagian Pengadaan;
 - Sub Bagian Pemeliharaan; dan
 - Sub Bagian Penatausahaan Aset.



- ❖ Biro Organisasi dan Korpri, yang membawahi:
 - Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan terdiri dari:
 - Sub Bagian Peningkatan Kapasitas Kelembagaan;
 - Sub Bagian Analisis dan Formasi Jabatan; dan
 - Sub Bagian Akuntabilitas dan Pengembangan Kinerja.
 - Bagian Ketatalaksanaan terdiri dari:
 - Sub Bagian Tata Laksana Pemerintahan;
 - Sub Bagian Pembinaan Pelayanan Publik; dan
 - Sub Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah dan Tata Usaha.
 - Bagian Korpri terdiri dari:
 - Sub Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani KORPRI;
 - Sub Bagian Usaha Dan Bantuan Sosial KORPRI; dan
 - Sub Bagian Organisasi dan Keanggotaan.
- ❖ Biro Humas, Protokol dan Penghubung, yang membawahi:
 - Bagian Humas dan Dokumentasi terdiri dari:
 - Sub Bagian Peliputan dan Dokumentasi;
 - Sub Bagian Publikasi; dan
 - Sub Bagian Tata Usaha.
 - Bagian Protokol terdiri dari:
 - Sub Bagian Acara dan Pelayanan Tamu;
 - Sub Bagian Protokol Pimpinan; dan
 - Sub Bagian Penyiapan Materi dan Naskah Sambutan.
 - Bagian Penghubung dan Kerjasama terdiri dari:
 - Sub Bagian Penghubung;
 - Sub Bagian Prasarana Penghubung; dan
 - Sub Bagian Kerjasama.



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau



B. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

1. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau memerlukan sumber daya untuk menggerakkan roda organisasi. Sumber daya yang dibutuhkan terdiri dari sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya berupa sarana prasarana. Sekretariat Daerah memiliki SDM yang cukup beragam. Jumlah SDM/PNS Sekretariat Daerah per 31 Desember 2020 sebanyak 329 orang, terdiri dari 197 orang atau 59,88% Laki-laki dan 132 orang atau 40,12% Perempuan. Sementara jumlah SDM Non PNS sebanyak 532 orang. Total keseluruhan SDM di Sekretariat Daerah berjumlah 861 orang.

Tabel 2.2.1
Komposisi PNS Sekretariat Daerah Prov. Kepulauan Riau
Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Struktur Organisasi	Jenis Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	Sekretaris Daerah	1	-	1
2	Staf Ahli	2	1	3
3	Asisten	3	-	3
4	Biro Pemerintahan dan Perbatasan	15	15	30
5	Biro Hukum	13	11	24
6	Biro Kesejahteraan Rakyat	13	14	27
7	Biro Administrasi Perekonomian	15	13	28
8	Biro Pengadaan Barang/Jasa	40	9	49
9	Biro Administrasi Pembangunan	13	11	24
10	Biro Umum	41	26	67
11	Biro Organisasi dan Korpri	5	14	19
12	Biro Humas Protokol dan Penghubung	36	18	54
Jumlah		197	132	329



Pada tabel dibawah ini, Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Daerah didominasi oleh Golongan III, yaitu sebanyak 225 orang atau sebesar 68,39%, diikuti Golongan IV sebanyak 62 atau 18,84 %, Golongan II sebanyak 40 orang atau 12,16 % dan terakhir Golongan I sebanyak 2 orang atau 0,61%.

Tabel 2.2.2
Komposisi PNS Sekretariat Daerah Prov. Kepulauan Riau
Berdasarkan Golongan

No.	Struktur Organisasi	Golongan			
		I	II	III	IV
1	Sekretaris Daerah	-	-	-	1
2	Staf Ahli	-	-	-	3
3	Asisten	-	-	-	3
4	Biro Pemerintahan dan Perbatasan	-	1	19	10
5	Biro Hukum	-	-	16	8
6	Biro Kesejahteraan Rakyat	-	1	21	5
7	Biro Administrasi Perekonomian	-	3	19	6
8	Biro Pengadaan Barang/Jasa	-	2	42	5
9	Biro Administrasi Pembangunan	-	1	16	7
10	Biro Umum	1	18	43	5
11	Biro Organisasi dan Korpri	-	1	14	4
12	Biro Humas Protokol dan Penghubung	1	13	35	5
Jumlah		2	40	225	62

Tabel dibawah ini menunjukan Komposisi PNS berdasarkan eselonering. Sampai saat ini hampir seluruh posisi jabatan struktural eselonering terisi di seluruh struktur organisasi di lingkungan Sekretariat Daerah.



Tabel 2.2.3
Komposisi PNS Sekretariat Daerah Prov. Kepulauan Riau
Berdasarkan Eselon

No.	Struktur Organisasi	Eselon			
		I	II	III	IV
1	Sekretaris Daerah	1	-	-	-
2	Staf Ahli	-	3	-	-
3	Asisten	-	3	-	-
4	Biro Pemerintahan dan Perbatasan	-	1	2	9
5	Biro Hukum	-	1	2	8
6	Biro Kesejahteraan Rakyat	-	1	2	8
7	Biro Administrasi Perekonomian	-	1	2	9
8	Biro Pengadaan Barang/Jasa	-	1	2	9
9	Biro Administrasi Pembangunan	-	1	3	9
10	Biro Umum	-	1	3	9
11	Biro Organisasi dan Korpri	-	1	2	8
12	Biro Humas Protokol dan Penghubung	-	1	3	9
Jumlah		1	15	21	78

Berdasarkan tingkat pendidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Daerah, sebagian besar memiliki jenjang pendidikan S1 yaitu sebanyak 174 orang atau 52,89% dari tujuh jenjang pendidikan yang ada. Hingga saat ini hanya 7 (tujuh) orang pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan S3 di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau seperti ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.2.4
Komposisi PNS Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No.	Struktur Organisasi	Jenjang Pendidikan						
		SD	SMP	SMA	D1-D3	S1	S2	S3
1	Sekretaris Daerah	-	-	-	-	-	-	1



No.	Struktur Organisasi	Jenjang Pendidikan						
		SD	SMP	SMA	D1-D3	S1	S2	S3
2	Staf Ahli	-	-	-	-	-	3	-
3	Asisten	-	-	-	-	-	-	3
4	Biro Pemerintahan dan Perbatasan	-	-	-	1	17	12	-
5	Biro Hukum	-	-	-	2	12	10	-
6	Biro Kesejahteraan Rakyat	-	-	2	4	15	5	1
7	Biro Administrasi Perekonomian	-	-	2	4	17	5	-
8	Biro Pengadaan Barang/Jasa	-	-	2	4	35	8	-
9	Biro Administrasi Pembangunan	-	-	-	1	14	7	2
10	Biro Umum	-	2	11	16	26	12	-
11	Biro Organisasi dan Korpri	-	-	-	2	11	6	-
12	Biro Humas Protokol dan Penghubung	-	1	11	5	27	10	-
Jumlah		-	3	28	39	174	78	7

Secara kuantitas, jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Daerah belum memadai jika diukur dari beban tugas yang dilimpahkan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi. Adapun kebutuhan Pegawai hingga 5 (lima) Tahun kedepan per masing-masing Biro adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.5
Komposisi Kebutuhan PNS Sekretariat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau Hingga Tahun 2026

No.	Struktur Organisasi	Tahun 2021	Tahun 2026	Kebutuhan Tambahan
1	Biro Pemerintahan dan Perbatasan	30	52	22
2	Biro Hukum	24	51	27
3	Biro Kesejahteraan Rakyat	27	50	23
4	Biro Administrasi Perekonomian	28	47	19
5	Biro Pengadaan Barang/Jasa	49	116	67
6	Biro Administrasi Pembangunan	24	51	27



No.	Struktur Organisasi	Tahun 2021	Tahun 2026	Kebutuhan Tambahan
7	Biro Umum	74	232	158
8	Biro Organisasi dan Korpri	19	59	40
9	Biro Humas Protokol dan Penghubung	54	108	54
Jumlah		329	766	437

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program/kegiatan maupun sub kegiatan dan belum memadainya jumlah PNS yang ada, maka PNS yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah dibantu oleh 532 orang pegawai non PNS (Pegawai Tidak Tetap/PTT dan Tenaga Harian Lepas/THL). Tingginya jumlah pegawai non PNS di lingkungan Sekretariat Daerah sebagian besar berada di Biro Umum dimaksudkan untuk mengisi kekosongan pegawai sebagai tenaga teknis seperti supir, nakhoda serta anak buah kapal (abk), pramu saji, pramu wisma serta tenaga teknis kelistrikan dan jaringan dan bidang tugas lapangan lainnya. Berikut dijelaskan data terpisah untuk pegawai non PNS di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan jenis kelamin dan jenjang pendidikannya.

Tabel 2.2.6
Komposisi Non PNS Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Struktur Organisasi	Jenis Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	Biro Pemerintahan dan Perbatasan	8	8	16
2	Biro Hukum	16	8	24
3	Biro Kesejahteraan Rakyat	13	15	28
4	Biro Administrasi Perekonomian	6	8	14
5	Biro Pengadaan Barang/Jasa	27	13	40
6	Biro Administrasi Pembangunan	9	5	14
7	Biro Umum	166	66	232
8	Biro Organisasi dan Korpri	9	6	15



No.	Struktur Organisasi	Jenis Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
9	Biro Humas Protokol dan Penghubung	93	56	149
Jumlah		347	185	532

Sesuai tabel diatas jumlah total pegawai non PNS di Lingkungan Sekretariat Daerah 532 orang. 347 orang atau 65,23% berjenis kelamin laki-laki sementara 185 orang atau 34,77 % berjenis kelamin perempuan.

Tabel 2.2.7
Komposisi Non PNS Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No.	Struktur Organisasi	Pendidikan					
		SD	SMP	SMA	D1-D3	S1	S2
1	Biro Pemerintahan dan Perbatasan	-	1	3	1	10	1
2	Biro Hukum	-	-	10	-	14	-
3	Biro Kesejahteraan Rakyat	-	-	11	-	16	1
4	Biro Administrasi Perekonomian	-	-	1	1	12	-
5	Biro Pengadaan Barang/Jasa	-	-	18	1	20	1
6	Biro Administrasi Pembangunan	-	-	8	1	5	-
7	Biro Umum	10	11	134	18	57	2
8	Biro Organisasi dan Korpri	-	1	5	-	9	-
9	Biro Humas Protokol dan Penghubung	1	3	74	10	60	1
Jumlah		11	16	264	32	203	6

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa pegawai non PNS didominasi lulusan SMA sederajat sebanyak 264 (dua ratus enam puluh empat) orang atau 49,62% dari total pegawai non PNS. Selanjutnya diikuti lulusan S1 sebanyak 203 (dua ratus tiga) orang atau 38,16%.



2. Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sumber daya berupa sarana dan prasarana penunjang di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau berpengaruh signifikan terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Rekapitulasi aset Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.3.1
Rekapitulasi Aset Sekretariat Daerah Prov. Kepulauan Riau
Per 31 Desember 2020

No.	Gol	Kode	Nama Barang	Jumlah	Keterangan Kondisi	Perkiraan Nilai (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
1	1	01	Tanah			19.030.000,00
2	2		Peralatan dan Mesin			
		01	Alat Besar	355	Sebagian Baik	8.304.257.200,00
		02	Alat Angkutan	419	Sebagian Baik	133.687.147.824,00
		03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	292	Sebagian Baik	5.960.125.348,00
		04	Alat Pertanian	74	Sebagian Baik	551.312.600,00
		05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	15.756	Sebagian Baik	92.689.364.107,92
		06	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	507	Sebagian Baik	14.808.104.440,00
		07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	24	Baik	336.287.875,00
		08	Alat Laboratorium	2500	Sebagian Baik	4.503.707.466,00
		09	Alat Persenjataan	2	Baik	2.410.000,00
		10	Komputer	1653	Sebagian Baik	14.130.278.152,00
		15	Alat Keselamatan Kerja	19	Baik	286.000.600,00
3	3		Gedung dan Bangunan			
		01	Bangunan Gedung	14	Sebagian Baik	10.743.149.796,63
4	4		Jalan, Irigasi dan Jaringan			



No.	Gol	Kode	Nama Barang	Jumlah	Keterangan Kondisi	Perkiraan Nilai (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
		01	Jalan dan Jembatan	3	Baik	3.464.120,00
		02	Bangunan air/Irigasi	7	Baik	257.990.110,00
		03	Instalasi	24	Kurang Baik	6.332.043.340,00
		04	Jaringan	25	Kurang Baik	13.609.109.035,00
5	5		Aset Tetap Lainnya			
		01	Buku Perpustakaan	149	Sebagian Baik	2.363.390.319,00
		02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	248	Sebagian Baik	1.297.348.300,00
		07	Aset Renovasi	21	Sebagian Baik	3.838.194.960,00
6	6		Aset Lainnya			
		01	Aset Tidak Berwujud	1	Sebagian Baik	546.506.000,00
		02	Aset Lain-lain	2	Sebagian Baik	4.426.008.402,18
TOTAL						313.722.715.595,55

*sumber: Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Pada saat ini, ketersediaan ruang kantor, ruang penyimpanan arsip dan barang, ketersediaan meja kursi pegawai serta media penyimpanan lainnya masih kurang memadai. Ukuran ruang kantor yang sama besar dipandang tidak efektif mengingat jumlah pegawai antar biro tidak sama. Karenanya perlu perhatian khusus dari SKPD yang berwenang terhadap penyediaan ruang kantor. Untuk saat ini kekurangan ruang/tempat penyimpanan diatasi biro-biro dengan menyewa tempat untuk penyimpanan arsip/barang.

Keterbatasan ketersediaan mobileir juga menjadi salah satu faktor kurang efektifnya pegawai baik PNS maupun non PNS dalam melaksanakan pekerjaan. Keterbatasan jumlah komputer yang masih baik beserta perangkat pendukungnya juga menjadi



kendala dalam bekerja. Tetapi pemenuhan kebutuhan ini akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan anggaran selama lima tahun kedepan.

C. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kinerja pelayanan di lingkungan Sekretariat Daerah diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Kinerja pelayanan merupakan capaian kinerja yang diperoleh dari perbandingan antara target kinerja dengan capaian kinerja serta dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut.

Kinerja pelayanan Sekretariat Daerah sesuai dengan Indikator Kinerja Utama dapat dilihat pada tabel pencapaian indikator kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau berikut ini:



Tabel 2.3.2

**Capaian Indikator Kinerja
di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2016-2021**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target						Realisasi Capaian						Ratio Capaian (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1	Persentase realisasi keuangan dan fisik kegiatan APBD dan APBN sesuai target	%	Fisik 100 Keu 90	Fisik 100 Keu 95	Fisik 100 Keu 95	Fisik 100 Keu 95	Fisik 100 Keu 95	Fisik 94 Keu 89	Fisik 84,55 Keu 88,04	Fisik 97,04 Keu 95,97	Fisik 97,37 Keu 97,48	Fisik 99,35 Keu 95,31	Fisik 99,35 Keu 97,48	N/A	94,0 0	84,5 5	97,0 4	97,3 7	99,3 5	N/A
2	Jumlah rekomendasi kebijakan dibidang perekonomian yang dihasilkan	Dok	-	1	5	6	7	8	N/A	13	13	6	7	N/A		1300	260	100	100	N/A
3	Skor rata-tingkat kesehatan BUMD	Skor	-	30	32	35	40	45	N/A	0	35	33,3 3	56,3 2	N/A	N/A	0	109, 38	95,2 3	140, 8	N/A
4	Peringkat LPPD Provinsi	Nilai	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	N/A	100	100	>10 0	>10 0	>100	N/A
5	Persentase Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	%	100	100	100	100	100	100	94,2 1	100	100	100	100	N/A	100	94,1 2	100	100	100	N/A
6	Persentase Perangkat Daerah yang telah tepat fungsi dan tepat ukur kelembagaannya	%	-	84	87	90	80	100	N/A	84	90	72	80	N/A	N/A	100	103, 45	80,0 0	100	N/A
7	Nilai /Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Nilai	60	63	67	70	72	75	62, 73	64,1 8	65,8 3	67,9 8	68,5 7	N/A	104, 55	101, 87	98,2 5	97,1 1	95,24	N/A

Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau



No	Indikator Kinerja	Satuan	Target						Realisasi Capaian						Ratio Capaian (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
8	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pelayanan Publik Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Kepulauan Riau	Indeks	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	N/A	100	100	100	100	100	N/A
9	Percentase ketepatan waktu realisasi pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	%	-	70	75	80	83	87	N/A	65,2	69,6	75,3	86,5	N/A	93,2	92,8	94,2	104,	3	N/A
10	Banyaknya Peraturan Produk Hukum Daerah yang dilakukan evaluasi dan dilakukan penyempurnaan sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum dan atau kesesilaan	Dok	-	6	7	7	7	7	N/A	10	6	4	30	N/A	166,	85,7	57,1	428,	N/A	67
11	Percentase pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah sesuai SOP	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	N/A	100	100	100	100	100	N/A
12	Percentase pelaksanaan pelayanan umum di lingkungan Sekretariat Daerah sesuai SOP	%	50	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	N/A	100	100	100	100	100	N/A

Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau



No	Indikator Kinerja	Satuan	Target						Realisasi Capaian						Ratio Capaian (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
13	Persentase aset milik Sekretariat Daerah yang terjamin keamanannya	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	N/A	100	100	100	100	100	N/A
14	Persentase Mubaligh yang tersertifikasi	%	-	-	25	50	80	100	N/A	25	25	66,60	80	N/A	N/A	2500	100	133,20	100	N/A
15	Persentase santri yang menjadi hafiz	%	-	20	40	60	80	100	N/A	N/A	N/A	25	25	N/A	N/A	N/A	41,67	31,25	N/A	N/A
16	Persentase media massa yang menyiarkan kegiatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	%	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	N/A	100	100	100	100	100	N/A



Dari tabel diatas yaitu capaian indikator kinerja di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sebagian besar nilai target pada kolom target, terutama pada tahun 2016 tidak tercantum dikarenakan nilai target pada dokumen Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau periode sebelumnya memang tidak terisi/tidak dicantumkan.
2. Dikarenakan tidak seluruhnya nilai target tahun 2016 dan sebagian kecil target tahun 2017 tidak tercantum maka sebagian besar kolom rasio capaian pada tahun 2016 dan tahun 2017 juga tidak dapat diisi walaupun terdapat realisasi capaian pada tahun tersebut.
3. Pada tahun 2021 belum dapat dihitung realisasi terakhir seluruh indikator kinerja maupun rasio capaian dikarenakan penyusunan RPJMD sampai dengan selesainya Peraturan Daerah tentang RPJMD (dokumen final) masih berada pada periode masa tahun berjalan (2021).
4. Beberapa rasio capaian nilainya melebihi target dikarenakan komitmen yang kuat dari pimpinan unit kerja terkait dan ketersediaan anggaran pada tahun berjalan sama dengan yang sudah direncanakan.
5. Beberapa rasio capaian tidak sesuai target dikarenakan pada saat perubahan seperti dijelaskan pada point 4 diatas tidak disejalankan dengan perubahan target termasuk ketersediaan anggaran yang tidak mencukupi (terjadi rasionalisasi anggaran/refocussing).



D. ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, sumber daya keuangan merupakan salah satu faktor yang menentukan pencapaian target kinerja, disamping sumberdaya manusia maupun sarana dan prasarana pendukung. Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau mulai Tahun 2016 sampai 2021 adalah sebagaimana tabel 2.3.3 berikut:



Tabel 2.3.3
Anggaran dan Realisasi Anggaran Pelayanan Per Program
di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2016-2021

Biro / Program	Anggaran Pada Tahun (dalam miliar rupiah)						Realisasi Anggaran Pada Tahun (dalam miliar rupiah)						Persentase Realisasi Anggaran Pada Tahun (%)					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Biro Pemerintahan dan Perbatasan																		
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Daerah	0,791	2,838	2,725	1,734	0,880	-	0,780	2,742	2,702	1,663	0,878	-	98,62	96,63	99,17	95,94	99,77	-
Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	0,328	0,975	0,530	0,760	0,102	-	0,326	0,922	0,496	0,712	0,102	-	99,36	94,56	93,64	93,71	100	-
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		2,279	2,699	2,630	2,100	-		2,141	2,437	2,444	1,971	-		93,94	90,30	92,93	93,92	-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		-	0,001	0,070	-	-		-	0,001	0,065		-		98,30	93,29	-	-	-
Biro Hukum																		
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	1,154	4,301	3,970	1,898	1,206	-	1,146	3,495	3,704	1,803	1,197	-	99,36	81,27	93,30	95,00	99,23	-



Biro / Program	Anggaran Pada Tahun (dalam miliar rupiah)						Realisasi Anggaran Pada Tahun (dalam miliar rupiah)						Percentase Realisasi Anggaran Pada Tahun (%)					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Program Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum	0,400	1,390	1,358	0,664	0,210	-	0,383	1,347	1,346	0,610	0,210	-	95,78	96,95	99,11	91,83	99,62	-
Program Pembinaan Hukum	0,176	0,367	0,300	0,075	0,027	-	0,176	0,346	0,275	0,068	0,027	-	99,98	94,06	91,77	90,67	99,22	-
Program Fasilitasi Bantuan dan Layanan Hukum	0,725	2,724	1,804	1,920	0,929	-	0,723	2,619	1,797	1,895	0,928	-	99,81	96,13	99,61	98,72	99,93	-
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1,839	1,922	1,686	1,154	-		1,731	1,865	1,642	1,131	-		94,12	97,08	97,42	98,04	-
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		0,850	-	-	-	-		0,745	-	-	-	-		87,66	-	-	-	-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		0,020	0,075	0,075	0,007	-		0,020	0,074	0,074	0,006	-		99,92	99,52	98,78	91,81	-
Program Pengembangan Data / Informasi	0,999	0,976	0,806	0,480	0,057	-	0,995	0,934	0,798	0,453	0,057	-	99,58	95,75	99,02	94,56	99,98	-
Biro Administrasi Pembangunan																		
Program E-Government	1,130	0,982	0,366	0,423	0,173	-	1,125	0,855	0,346	0,270	0,168	-	99,56	87,05	94,64	63,97	97,43	-
Program Peningkatan Monitoring, Evaluasi dan	0,516	2,364	2,340	1,858	0,714	-	0,516	2,231	2,098	1,387	0,709	-	99,98	94,37	89,67	74,70	99,38	-



Biro / Program	Anggaran Pada Tahun (dalam miliar rupiah)						Realisasi Anggaran Pada Tahun (dalam miliar rupiah)						Percentase Realisasi Anggaran Pada Tahun (%)					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Pengendalian Pembangunan																		
Program Peningkatan Administrasi Pembangunan	0,024	1,924	0,979	1,548	0,232	-	0,024	1,805	0,912	0,674	0,021	-	100	93,83	93,20	43,53	95,25	-
Program Pembinaan dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	0,051	0,235	0,245	0,210	0,035	-	0,051	0,226	0,228	0,182	0,031	-	99,98	96,26	92,82	87,10	90,49	-
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		2,210	2,431	2,363	1,594	-		2,105	2,234	2,160	1,559	-		95,23	91,91	91,44	97,82	-
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		0,512	0,180	0,352	0,089	-		0,455	0,170	0,264	0,088	-		88,74	94,76	75,00	99,58	-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		0,144	0,124	0,207	0,090	-		0,138	0,117	0,090	0,089	-		95,70	94,91	43,55	98,74	-
Program Perencanaan Pembangunan Daerah		0,438	0,714	0,628	0,052	-		0,420	0,659	0,480	0,018	-		95,93	92,25	76,37	35,61	-
Biro Pengadaan Barang / Jasa																		
Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		0,637	1,166	0,769	0,707	-		0,635	1,165	0,767	0,684	-		99,81	99,92	99,78	96,77	-



Biro / Program	Anggaran Pada Tahun (dalam miliar rupiah)						Realisasi Anggaran Pada Tahun (dalam miliar rupiah)						Percentase Realisasi Anggaran Pada Tahun (%)					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Program E-Procurement	1,130	-	0,915	0,484	0,726	-	1,125	-	0,907	0,461	0,719	-	99,56	-	99,13	95,26	99,07	-
Program E-Government		0,894	-	-	-	-		0,892	-	-	-	-		99,71	-	-	-	-
Program Peningkatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan		0,030	-	-	-	-		0,029	-	-	-	-		99,90	-	-	-	-
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		2,062	2,709	3,194	3,012	-		2,007	2,670	3,149	2,992	-		97,33	98,57	98,58	99,34	-
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		0,355	0,298	0,355	0,475	-		0,355	0,298	0,335	0,458	-		100	99,87	94,50	96,32	-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		0,362	0,378	-	-	-		0,362	0,378	-	-	-		99,97	100	-	-	-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		-	0,047	0,017	0,002	-		-	0,047	0,017	0,002	-		-	99,69	99,80	100	-
Program Perencanaan Pembangunan Daerah		0,050	0,310	0,256	0,274	-		0,049	0,309	0,253	0,274	-		99,02	99,56	98,91	99,98	-
Biro Umum																		
Program Pelayanan	9,402	9,737	12,364	11,219	10,683	-	9,297	7,916	11,767	10,218	9,584	-	98,88	81,29	95,17	91,08	89,72	-



Biro / Program	Anggaran Pada Tahun (dalam miliar rupiah)						Realisasi Anggaran Pada Tahun (dalam miliar rupiah)						Percentase Realisasi Anggaran Pada Tahun (%)					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Kedinasan KDh/WKDh yang difasilitasi																		
Program Dukungan Pelayanan Umum		43,864	35,089	37,118	36,007	-		42,197	33,350	36,156	34,954	-		96,20	95,04	97,41	97,08	-
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dilingkungan Sekretariat Daerah	4,890	4,041	3,279	3,018	1,852	-	4,275	3,416	2,963	2,648	1,787	-	87,41	84,53	90,36	87,76	96,48	-
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		33,218	28,308	15,657	14,230	-		32,258	27,561	15,230	13,715	-		97,11	97,36	97,27	96,38	-
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		0,766	0,500	0,607	0,339	-		0,765	0,498	0,605	0,336	-		99,89	99,47	99,81	99,13	-
Program Peningkatan Disiplin Aparatur		1,214	0,718	1,300	1,095	-		1,202	0,699	1,223	1,082	-		98,99	97,41	94,08	98,85	-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	70,564	74,152	45,923	49,478	41,048	-	68,576	66,615	43,598	48,517	38,584	-	97,18	89,84	94,93	98,06	94,00	-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		0,135	0,155	0,156	0,345	-		0,135	0,154	0,155	0,341	-		99,99	99,87	99,81	98,89	-



Biro / Program	Anggaran Pada Tahun (dalam miliar rupiah)						Realisasi Anggaran Pada Tahun (dalam miliar rupiah)						Percentase Realisasi Anggaran Pada Tahun (%)					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Biro Kesejahteraan Rakyat																		
Program Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan	3,718	21,338	10,741	32,702	23,078	-	3,466	19,003	9,797	31,259	22,918	-	93,21	89,06	91,21	95,59	99,31	-
Program Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	0,443	1,204	1,015	0,828	0,198	-	0,347	1,015	0,999	0,748	0,197	-	78,30	84,30	98,51	90,27	99,74	-
Program Peningkatan Kerukunan Antar Umat Beragama	0,702	-	-	-	-	-	0,603	-	-	-	-	-	85,96	-	-	-	-	-
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1,857	4,147	5,089	3,832	-		1,748	4,089	4,436	3,813	-		94,16	98,59	87,18	99,51	-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		-	0,050	0,090	0,023	-		-	0,038	0,045	0,019	-		76,21	50,59	82,99	-	
Biro Administrasi Perekonomian																		
Program Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Asistensi Pembangunan	0,760	2,105	1,914	1,360	0,573	-	0,752	2,079	1,875	1,331	0,572	-	99,00	98,76	97,97	97,90	99,96	-



Biro / Program	Anggaran Pada Tahun (dalam miliar rupiah)						Realisasi Anggaran Pada Tahun (dalam miliar rupiah)						Percentase Realisasi Anggaran Pada Tahun (%)					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Program Peningkatan Kinerja BUMD	0,220	0,446	0,657	0,630	0,336	-	0,215	0,378	0,441	0,239	0,323	-	97,84	84,74	67,22	38,09	96,11	-
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		2,633	2,706	2,614	1,872	-		2,554	2,620	2,584	1,791	-		97,01	96,85	98,87	95,67	-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		0,063	0,050	0,050	-	-		0,055	0,049	0,046	-	-		88,82	99,20	92,88	-	-
Biro Organisasi dan Korpri																		
Program Kelembagaan Organisasi Pemerintah Daerah	0,670	0,611	0,332	0,809	0,188	-	0,608	0,559	0,331	0,774	0,188	-	90,77	91,45	99,64	95,70	99,85	-
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	0,276	0,463	0,360	0,390	0,035	-	0,266	0,454	0,354	0,368	0,034	-	96,40	97,93	98,54	94,61	99,29	-
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Informasi Publik	0,472	1,090	0,275	0,747	0,132	-	0,453	1,017	0,257	0,727	0,132	-	96,01	93,34	93,55	97,30	99,98	-
Program pembentukan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	0,107	0,099	0,476	0,735	0,393	-	0,103	0,087	0,442	0,693	0,381	-	96,26	87,77	92,75	94,42	96,88	-



Biro / Program	Anggaran Pada Tahun (dalam miliar rupiah)						Realisasi Anggaran Pada Tahun (dalam miliar rupiah)						Percentase Realisasi Anggaran Pada Tahun (%)					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Program Kesejahteraan Anggota Korpri		1,012	0,959	1,513	0,176	-		0,939	0,930	1,485	0,176	-		92,80	96,92	98,18	99,98	-
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1,460	1,968	2,365	1,795	-		1,424	1,814	2,352	1,758	-		97,52	92,21	99,47	97,90	-
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		0,120	0,100	0,085	-	-		0,119	0,098	0,079	-	-		99,01	98,91	92,95	-	-
Program Peningkatan Disiplin Aparatur		0,150	0,069	0,080	0,054	-		0,149	0,069	0,079	0,054	-		99,43	99,97	99,94	100	-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	0,359	0,210	0,208	0,210	0,114	-	0,339	0,200	0,207	0,205	0,114	-	94,59	94,91	99,54	97,68	99,98	-
Biro Humas Protokol dan Penghubung																		
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH	10,753	11,108	20,717	6,017	7,492	-	10,726	10,925	19,970	5,978	7,461	-	99,74	98,35	96,39	99,35	99,59	-
Program Pengembangan Publikasi, Komunikasi dan Informasi	6,010	12,346	7,815	33,735	27,277	-	6,006	12,294	7,754	32,612	27,266	-	99,74	99,58	99,22	96,67	99,96	-
Program Fasilitasi dan Kerjasama		4,772	7,894	3,611	2,195	-		4,645	7,596	3,455	2,192	-		97,34	96,21	95,69	99,87	-



Biro / Program	Anggaran Pada Tahun (dalam miliar rupiah)						Realisasi Anggaran Pada Tahun (dalam miliar rupiah)						Percentase Realisasi Anggaran Pada Tahun (%)					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
dengan Berbagai Pihak																		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	22,297	13,988	12,258	8,894	-		18,665	12,388	12,022	8,864	-		83,71	88,56	98,08	98,67	-	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	0,689	0,362	-		-	-	0,671	0,362	-		-	-	97,40	99,93	-	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1,179	0,833	0,603	-	-		1,125	0,687	0,583	-	-		95,44	82,47	96,61	-	-	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	0,044	0,094	0,092	-	-		0,040	0,090	0,091	-	-		91,27	95,21	99,23	-	-	
Program Pengembangan Data / Informasi	0,326	0,839	0,576	0,343	-		0,325	0,787	0,553	0,343	-		99,80	93,81	96,02	100	-	
	227,24	285,84	235,29	251,10	199,92	-	222,71	263,93	223,67	240,11	193,89	-	98,01	93,65	95,76	95,62	96,98	-

*Sumber: LKPJ Sekretariat Daerah Prov. Kepulauan Riau 2016-2020



Pagu anggaran sebagaimana dijelaskan pada tabel diatas adalah pagu pada Perubahan APBD. Trend besaran pagu cenderung meningkat kecuali pada Tahun 2018 dan Tahun 2020, pagu total Tahun 2018 turun sebesar 17,68% dari tahun sebelumnya dikarenakan defisit anggaran yang dialami Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Namun defisit anggaran ini tidak memberikan pengaruh yang signifikan pada unit kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sedangkan pada Tahun 2020 pagu anggaran turun sebesar 20,38% dari tahun sebelumnya. Hal ini diakibatkan karena pada akhir triwulan I Tahun Anggaran 2020 yaitu pada bulan Maret Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Status Bencana Non Alam yaitu Pandemi *Corona Virus Disease-2019* atau *Covid-19*. Sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* maka seluruh Pemerintah Daerah termsuk Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau diminta merealokasikan sejumlah anggaran kedalam bentuk Belanja Tidak Terduga untuk penanganan pencegahan Covid-19 dan pada akhirnya mengakibatkan terjadinya rasionalisasi baik dari pendapatan maupun belanja. Sedangkan realisasi anggaran pada Tahun Anggaran 2020 termasuk cukup baik yaitu realisasi mencapai 96,98%. Realisasi anggaran tiap tahunnya tidak terserap habis dikarenakan adanya sisa lelang, belanja yang memang tidak habis dibelanjakan, efisiensi anggaran dan lainnya. Upaya yang harus dilakukan kedepan agar realisasi anggaran bisa lebih optimal adalah anggaran disusun dengan mekanisme penganggaran berbasis kinerja, optimalisasi belanja dan percepatan proses pengadaan barang dan jasa.

E. PELUANG DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Peluang dan tantangan pengembangan pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau menjadi tumpuan untuk menyusun kinerja pelayanan 5 (lima) tahun kedepan. Tantangan yang dihadapi berasal dari lingkungan eksternal organisasi. Sementara perubahan strategi dalam skala regional, nasional dan internasional



mampu memberikan peluang pengoptimalan pengembangan pelayanan Sekretariat Daerah.

A. Peluang dalam pengembangan pelayanan Sekretariat Daerah antara lain, yaitu:

1. Komitmen Kepala Daerah yang tinggi dalam pengembangan organisasi dan peningkatan layanan organisasi;
2. Kebijakan dan dukungan Pemerintah dalam mengembangkan *good governance*;
3. Kebijakan dan dukungan Pemerintah dalam peningkatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
4. Perkembangan teknologi informasi dalam mendukung peningkatan layanan administrasi dan peningkatan kinerja;
5. Kerjasama yang terjalin baik antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau.
6. Kondisi geografis yang sangat strategis dan mendapat dukungan penuh dari Pemerintah dalam hal peningkatan infrastruktur dan peningkatan sektor pertumbuhan ekonomi.

B. Sedangkan tantangan dalam pengembangan pelayanan Sekretariat Daerah antara lain, yaitu:

1. Peningkatan kewenangan Pemerintah Provinsi dalam pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten/Kota;
2. Inkonsistensi beberapa kebijakan Pemerintah;
3. Pelayanan administratif secara cepat dan tepat menghendaki kemampuan aparatur yang semakin handal dan profesional;
4. Tuntutan penyelenggaraan pelayanan publik dan pelayanan administrasi yang semakin efektif dan efisien;
5. Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat;
6. Penerapan kebijakan penggunaan angaran dan pelaporan kinerja yang semakin transparan dan akuntabel;
7. Penyederhanaan birokrasi dengan penyederhanaan jabatan administrasi;



BAB III

ISU-ISU STRATEGIS

BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD di masa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebagai unsur pembantu pimpinan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau bertugas membantu Gubernur Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, fasilitasi kebijakan, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Sekretaris Daerah sendiri di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dan atas usulan Gubernur. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau dibantu oleh 3 (tiga) Asisten yang masing-masing Asisten membawahi 3 Biro sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Berdasarkan uraian diatas dan melalui pendekatan seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis juga memperhatikan kekuatan dan kelemahan lembaga/institusi Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, maka permasalahan dan isu-isu strategis



penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi menjadi rujukan penting dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan (2021-2026).

A. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, terdapat permasalahan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut. Permasalahan ini dikarenakan adanya benturan antara kondisi yang diharapkan dengan kondisi riil di lapangan.

Permasalahan ini perlu dilidentifikasi sebagai bahan evaluasi untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik di periode selanjutnya. Adapun permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- ❖ Biro Pemerintahan dan Perbatasan
 - Belum optimalnya penyusunan Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - Belum optimalnya pengelolaan daerah dan pulau-pulau perbatasan serta belum terselesaikannya batas darat antar Kabupaten/Kota;
 - Belum optimalnya penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan se-Provinsi Kepulauan Riau;
 - Masih rendahnya kuantitas dan kualitas aparatur Biro Pemerintahan dan Perbatasan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
- ❖ Biro Hukum
 - Belum optimalnya koordinasi SKPD dan Kabupaten/Kota dalam penyusunan produk hukum daerah;
 - Belum optimalnya penyusunan produk hukum daerah yang sesuai dengan kondisi daerah dan peraturan perundang-undangan diatasnya;



- Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM) dan kurangnya pendidikan pelatihan bagi SDM penyusun produk hukum daerah baik di tingkat provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota.
- ❖ Biro Kesejahteraan Rakyat
 - Belum optimalnya koordinasi dengan instansi terkait dalam perumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat;
 - Belum tersusunnya database dibidang keagamaan secara aktual;
 - Masih rendahnya kuantitas dan kualitas aparatur Biro Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
- ❖ Biro Administrasi Perekonomian
 - Masih rendahnya koordinasi, sinkronisasi antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Instansi terkait dalam penyusunan kebijakan di bidang perekonomian daerah;
 - Masih adanya kebijakan perekonomian yang sudah dihasilkan namun belum diimplementasikan dan ditindaklanjuti;
 - Belum optimalnya kinerja BUMD akibat masih minimnya kebijakan daerah dalam mendukung peningkatan kinerja BUMD;
 - Masih rendahnya kuantitas dan kualitas aparatur Biro Administrasi Perekonomian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
- ❖ Biro Pengadaan Barang/Jasa
 - Masih kurangnya kuantitas sumberdaya aparatur pelaksana pengadaan barang/jasa sehingga pendampingan kepada SKPD terkait proses dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa menjadi tidak maksimal;
 - Belum optimalnya kapasitas sumberdaya aparatur pelaksana pengadaan barang/jasa dalam memahami aturan terbaru terkait pengadaan/barang jasa Pemerintah;
 - Belum optimalnya pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah sesuai prinsip-prinsip pengadaan;



- Belum maksimalnya pengelolaan dan pengembangan pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik;
- ❖ Biro Administrasi Pembangunan
 - Belum optimalnya koordinasi dengan instansi terkait dalam perumusan kebijakan di bidang administrasi pembangunan;
 - Belum optimalnya pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan baik yang bersumber dari dana APBD maupun APBN;
 - Masih rendahnya kuantitas dan kualitas aparatur Biro Administrasi Pembangunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
- ❖ Biro Umum
 - Belum optimalnya penyelenggaraan administrasi umum dalam mendukung pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Daerah;
 - Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah;
 - Belum optimalnya pelayanan kedinasan kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - Belum optimalnya pelayanan pemenuhan kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - Belum optimalnya pengelolaan aset di Lingkungan Sekretariat Daerah;
 - Masih rendahnya kuantitas dan kualitas aparatur Biro Umum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
- ❖ Biro Organisasi dan Korpri
 - Masih rendahnya kualitas koordinasi antara Biro Organisasi dan Korpri dengan seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan penerapan Zona Inregritas;
 - Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi dalam meningkatkan tata laksana dan kelembagaan organisasi pada Perangkat Daerah;



- Masih rendahnya kuantitas dan kualitas aparatur Biro Organisasi dan Korpri dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
- ❖ Biro Humas, Protokol dan Penghubung
 - Belum optimalnya penyebarluasan informasi pembangunan daerah kepada masyarakat;
 - Belum optimalnya kapasitas sumberdaya aparatur Biro Humas, Protokol dan Penghubung di bidang pelayanan kedinasan KDH/WKDh;
 - Belum optimalnya kualitas pelayanan dan tata kelola kehumasan serta keprotokolan;
 - Belum optimalnya tata hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang lebih harmonis dan sinergis;
 - Masih rendahnya kuantitas dan kualitas aparatur Biro Humas, Protokol dan Penghubung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

B. TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TERKAIT DENGAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada 5 (lima) tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung didalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD tahun 2005-2025). Di dalam RPJPD ditegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: ***“Kepulauan Riau Berbudaya, Maju dan Sejahtera”***. Visi bersama dan etos kerja ini menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Dengan memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan tersebut di atas, dan juga memperhatikan kondisi permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapai sekaligus tertuang dalam isu-isu strategis, maka dirumuskan visi, misi



tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Visi

Pengertian visi diartikan sebagai gambaran spesifik tentang apa yang ingin dicapai dan misi adalah bagaimana visi itu diwujudkan, kemudian berdasarkan visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan tujuan serta sasaran-sasaran yang akan dicapai beserta indikator-indikatornya. Visi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 adalah:

“Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya”.

Kata kunci dari visi Provinsi Kepulauan Riau periode 2021-2026 dapat dijelasakan sebagai berikut:

- **Makmur:** Kehidupan masyarakat Kepulauan Riau yang layak, dan sejahtera.
- **Berdaya Saing:** Terwujudnya masyarakat yang sehat, birokrasi pemerintahan dan dunia usaha yang mampu bersaing dan unggul di tingkat regional dan internasional.
- **Berbudaya:** Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan pembangunan dan aktivitas masyarakat Kepulauan Riau yang lebih berpegang pada nilai-nilai agama, budaya Melayu dan budaya Nasional.

2. Misi

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Oleh karena itu, sebuah visi belum dapat dikatakan sempurna tanpa adanya serangkaian misi yang berfungsi untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai Visi pembangunan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026, maka dirumuskan misi sebagai berikut:



1. Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat.

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau. Upaya tersebut dilakukan dengan kembali memulihkan perekonomian Kepulauan Riau yang sempat terjatuh cukup dalam akibat Covid-19. Upaya tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan dan mengandalkan potensi daerah yang dimiliki sebagai sumber daya pembangunan Kepulauan Riau. Provinsi Kepulauan Riau yang secara demografis sebagai daerah maritim dengan potensi laut yang besar tentu menjadi suatu modal penting yang dapat digunakan dalam pembangunan ekonomi. Di sisi lain, berbagai potensi lainnya seperti perindustrian, pariwisata dan lain-lain yang akan dikelola secara maksimal sehingga hal tersebut akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kemakmuran masyarakat Provinsi Kepulauan Riau.

2. Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan.

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam mencapai pemerintahan yang bersih, terbuka, dan berorientasi pelayanan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kinerja pemerintahan dapat berjalan dengan stabil dan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Untuk memastikan kedua hal tersebut dapat dicapai maka langkah yang ditempuh melalui perwujudan keterbukaan informasi, pemerintahan yang bebas KKN, dan pemerintahan yang tanggap, tangkas, dan tangguh. Selain itu, untuk menunjang pelaksanaan hal tersebut maka kualitas dan penempatan pegawai yang sesuai juga menjadi fokus lainnya yang akan dibenahi.



3. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat, dan Berdaya Saing dengan Berbasiskan Iman dan Taqwa.

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam pembangunan sumber daya manusia di Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini juga tidak terlepas dari pengaruh Era Globalisasi yang menuntut SDM yang bisa bersaing dalam hal keahlian dan kompetensi yang dimiliki. Upaya untuk menjawab tantangan tersebut dilakukan dengan meningkatkan kualitas, kesehatan, dan daya saing SDM. Namun demikian, pembangunan manusia tersebut tidak hanya ditekankan pada pengembangan kualitas dan daya saing tetapi juga dengan menjadikan nilai-nilai iman dan taqwa sebagai nilai fundamental dalam pembangunan manusia. Oleh karena itu, tujuan pembangunan manusia dalam misi ini dimaksudkan agar SDM di Kepulauan Riau memiliki jaring pengaman sosial yang memadai dan menjadi SDM yang unggul dan ber karakter.

4. Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam mengembangkan dan melestarikan budaya Melayu dalam Pembangunan. Budaya Melayu merupakan pilar penting dalam kehidupan bermasyarakat yang perlu dijaga kelestariannya. Budaya Melayu sebagai suatu filosofi hidup masyarakat Kepulauan Riau pernah mengantarkan Kepulauan Riau menjadi daerah maju dengan kehidupan masyarakat yang makmur. Upaya pelestarian budaya Melayu ini dimaksudkan untuk menjaga filosofi hidup masyarakat Kepulauan Riau tetap terjaga sehingga tidak tergerus oleh zaman. Di sisi lain, kemajemukan masyarakat Kepulauan Riau menjadi modal sosial tersendiri dalam beragama, berkebudayaan dan bermasyarakat. Oleh karena itu, untuk memperekat hal tersebut maka keselarasan, keserasian, dan toleransi antar umat beragama, suku, dan etnis menjadi pilar penting yang harus dijaga dan dilestarikan melalui penguatan nilai-nilai budaya nasional di masyarakat.



5. Mempercepat Konektivitas Antar Pulau dan Pembangunan Infrastruktur Kawasan.

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam mempercepat pembangunan infrastruktur antar pulau untuk mengintegrasikan dan mempercepat pembangunan kawasan pesisir. Masih terjadinya ketimpangan pembangunan antar pulau, transportasi yang terbatas serta infrastruktur dasar yang minim menyebabkan pergerakan ekonomi yang lambat serta kualitas ekonomi yang buruk. Hal tersebut dapat terselesaikan dengan pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, pelabuhan, akses transportasi antar pulau dan juga pembangunan air bersih, listrik, dan jaringan telekomunikasi yang dapat menjangkau setiap daerah.

Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Sekretariat Daerah
terhadap Pencapaian Visi dan Misi RPJMD

No.	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Misi 1: Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat Tujuan: Percepatan Pemulihan dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sasaran: Peningkatan PAD	1. Masih rendahnya koordinasi, sinkronisasi antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Instansi terkait dalam penyusunan kebijakan di bidang perekonomian daerah	1. Rendahnya partisipasi instansi termasuk sektor swasta dalam perumusan kebijakan perekonomian daerah	1. Otonomi daerah yang semakin baik sehingga pemerintah daerah dapat lebih leluasa dalam merumuskan kebijakan perekonomian daerah
	Misi 2: Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan	1. Belum optimalnya penyusunan Laporan Kinerja	1. Kurangnya ketersediaan data di SKPD sesuai	1. Terbentuknya tim koordinasi penyusunan LPPD



No.	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	<p>yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan</p> <p>Tujuan: Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kuat, dan Antisipatif</p> <p>Sasaran: Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan</p>	<p>Penyelenggaraan Pemerintah Daerah</p> <p>2. Belum optimalnya penyusunan produk hukum daerah yang sesuai dengan kondisi daerah dan peraturan perundang-undangan diatasnya</p> <p>3. Belum optimalnya pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah sesuai prinsip-prinsip pengadaan</p> <p>4. Belum optimalnya koordinasi dengan instansi terkait dalam perumusan kebijakan di bidang administrasi pembangunan</p> <p>5. Belum optimalnya penyelenggaraan administrasiumum dalam mendukung pelaksanaan tugas di lingkungan Sekertariat Daerah</p> <p>6. Belum optimalnya pelaksanaan tugas</p>	<p>format yang dibutuhkan dalam LPPD</p> <p>2. Minimnya pemahaman SDM penyusun produk hukum dan lemahnya koordinasi dengan SKPD terkait</p> <p>3. Keterbatasan kuantitas pelaksana pengadaan Barang/Jasa di UKPBJ dan rendahnya pemahaman proses pengadaan barang/jasa di SKPD</p> <p>4. Masih banyaknya perbedaan pemahaman dalam perumusan regulasi/ kebijakan administrasi pembangunan terkini</p> <p>5. Belum tersusunnya SOP dan SPM terkait administrasi umum secara menyeluruh</p> <p>6. Koordinasi dengan seluruh</p>	<p>yang lebih solid dan melibatkan seluruh SKPD terkait.</p> <p>2. Keterlibatan SKPD terkait bersama Biro Hukum dalam melakukan penyusunan dan telaah produk hukum</p> <p>3. Regulasi hukum dan aturan pengadaan barang jasa yang semakin efektif, efisien, transparan dan akuntabel.</p> <p>4. Terbentuknya tim koordinasi dan pelaksanaan FGD secara intensif dan rutin yang melibatkan lebih banyak instansi vertikal serta SKPD terkait.</p> <p>5. Dukungan anggaran yang memadai dalam penyelenggaraan administrasi umum.</p> <p>6. Komitmen yang kuat dari seluruh</p>



No.	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		<p>dan fungsi dalam meningkatkan tata laksana dan kelembagaan organisasi pada Perangkat Daerah</p> <p>7. Belum optimalnya kualitas pelayanan dan tata kelola kehumasan serta keprotokolan</p>	<p>SKPD belum berjalan secara proporsional</p> <p>7. Sarana dan prasarana serta peningkatan kapasitas aparatur bidang kehumasan dan keprotokolan yang kurang memadai</p>	<p>SKPD dalam melaksanakan perubahan secara menyeluruh dalam menjawab tuntutan Reformasi Birokrasi</p> <p>7. Dukungan anggaran yang memadai dalam publikasi di media massa dan layanan keprotokolan</p>
	<p>Misi 4: Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan</p> <p>Tujuan: Pembinaan Keagamaan, Pelestarian Budaya, dan Harmoni Masyarakat</p> <p>Sasaran: Peningkatan Harmonisasi Umat Beragama</p>	<p>1. Belum optimalnya koordinasi dengan instansi terkait dalam perumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat</p>	<p>1. Minimnya partisipasi dari instansi terkait dalam perumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat</p>	<p>1. Komitmen Pimpinan dan dukungan Instansi legislatif dalam peningkatan kesejahteraan rakyat dan kerukunan umat beragama</p>

C. TELAAH RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA YANG SEJENIS

Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, Sekretariat Daerah tidak memiliki hubungan vertikal secara langsung dengan Kementerian/Lembaga Negara lainnya. Namun Sekretariat Daerah membantu Gubernur untuk mendukung visi dan misi Presiden Republik Indonesia Sesuai Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020



tentang RPJM Nasional Tahun 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”. Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 9 misi pembangunan yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing.
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan.
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa.
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya.
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman para Seluruh Warga.
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya.
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Selanjutnya terdapat 7 agenda pembangunan dalam mendukung misi tersebut diwujudkan pada Kabinet Indonesia Maju, yakni:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dari ke-9 (sembilan) Misi dan ke-7 (tujuh) Agenda Pembangunan Kabinet Indonesia Maju tersebut terdapat keterkaitan dengan pencapaian yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah yaitu:



- Misi ke-8 Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya terkait tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. Misi ini sejalan dengan Misi ke- 2 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 yaitu Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan dan terkait langsung dengan program pemerintah pusat di daerah yaitu Program Reformasi Birokrasi yang dikoordinir oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Hal ini juga sejalan dengan Indikator Kinerja Utama Provinsi Kepulauan Riau berupa Indeks Reformasi Birokrasi dimana di tingkat Daerah akan dikoordinir bersama antara perangkat daerah yang membidangi perencanaan, perangkat daerah yang membidangi pengawasan dan Sekretariat Daerah sebagai koordinator utama dibawah kendali Biro Organisasi dan Korpri.

1. Telaah Renstra Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB)

Adapun Telaah Renstra Kementerian PANRB terhadap Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

- Visi Kementerian PANRB yaitu “Mewujudkan Aparatur Negara yang Profesional dan Berintegritas Tinggi untuk Mencapai Pemerintahan yang Berkelas Dunia dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan visi presiden dan wakil presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian yang berlandaskan Gotong Royong”
- Sedangkan untuk mencapai visi tersebut, Kementerian PANRB menjalankan 6 (enam) misi yaitu sebagai berikut:
 - a. Menciptakan Kelembagaan dan Tata Kelola Birokrasi yang Ramping, Lincah, Terintegrasi dan Berbasis Elektronik – *digital bureaucracy*.
 - b. Membangun SDM Aparatur yang Adaptif, Profesional, Kompetitif dan Berwawasan Global.



- c. Mengembangkan Sistem Manajemen Kinerja Instansi Pemerintah yang Transparan dan Akuntabel.
 - d. Menciptakan Sistem Pengawasan yang Profesional, Independen dan Berintegritas.
 - e. Mewujudkan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel dan Melayani.
 - f. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Reformasi Birokrasi.
- Adapun Kementerian PANRB mempunyai 2 (dua) tujuan yaitu:
- a. Terwujudnya birokrasi yang berkualitas, kapabel dan berdaya saing
 - b. Terwujudnya Kementerian PANRB yang berkualitas dan kapabel.

Namun dari 2 tujuan tersebut yang saling terkait dengan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah tujuan pertama yaitu Terwujudnya birokrasi yang berkualitas, kapabel dan berdaya saing.

Melalui tujuan ini Kementerian PANRB melakukan upaya-upaya lanjutan untuk menciptakan birokrasi yang memiliki kemampuan yang andal dalam menghadapi revolusi industri 4.0 dan menyikapi era disrupsi. Birokrasi diartikan secara luas yaitu keseluruhan sistem yang menjalankan tugas fungsi negara yaitu lembaga/organisasi, SDM, dan manajemen sektor publik yang diarahkan untuk dapat bersaing dengan kemajuan bangsa dan negara lain di tingkat dunia. Pencapaian tujuan pertama ini akan diukur dengan indikator nilai pelaksanaan RB Nasional yang merupakan gambaran pelaksanaan RB seluruh instansi pemerintah baik K/L, Provinsi dan Kabupaten/Kota

Dari tujuan pertama tadi Kementerian PANRB memiliki 6 (enam) sasaran strategis yaitu:

Sasaran 1 : Terwujudnya kelembagaan yang sederhana, responsif, adaptif dan kolaboratif serta SPBE yang terintegrasi.

Sasaran 2 : Terwujudnya ASN yang profesional, berintegritas dan sejahtera.

Sasaran 3 : Terwujudnya instansi pemerintah yang efektif, efisien dan akuntabel.

Sasaran 4 : Terwujudnya birokrasi yang bersih dan berintegritas.



Sasaran 5 : Terwujudnya kualitas Pelayanan Publik yang prima.

Sasaran 6 : Peningkatan efektivitas Reformasi Birokrasi Nasional.

Tabel 3.2

Permasalahan Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Renstra Kementerian PANRB

beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Tujuan dan Sasaran Renstra Kementerian PANRB	Permasalahan Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	<p>Tujuan 1: Terwujudnya birokrasi yang berkualitas, kapabel dan berdaya saing</p> <p>Sasaran 1: Terwujudnya kelembagaan yang sederhana, Responsif, adaptif dan kolaboratif serta SPBE yang terintegrasi.</p> <p>Sasaran 2: Terwujudnya ASN yang profesional, berintegritas dan sejahtera.</p> <p>Sasaran 3: Terwujudnya instansi pemerintah yang efektif, efisien dan akuntabel.</p> <p>Sasaran 4: Terwujudnya birokrasi yang bersih dan berintegritas.</p> <p>Sasaran 5: Terwujudnya kualitas Pelayanan Publik yang prima.</p> <p>Sasaran 6:</p>	<ol style="list-style-type: none"> Belum optimalnya penyusunan Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Belum optimalnya penyusunan produk hukum daerah yang sesuai dengan kondisi daerah dan peraturan perundang-undangan diatasnya Masih rendahnya koordinasi, sinkronisasi antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Instansi terkait dalam penyusunan kebijakan di bidang perekonomian daerah Belum optimalnya pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah sesuai prinsip-prinsip pengadaan Belum optimalnya koordinasi dengan instansi terkait dalam 	<ol style="list-style-type: none"> Kurangnya ketersediaan data di SKPD sesuai format yang dibutuhkan dalam LPPD Minimnya pemahaman SDM penyusun produk hukum dan lemahnya koordinasi dengan SKPD terkait Rendahnya partisipasi instansi termasuk sektor swasta dalam perumusan kebijakan perekonomian daerah Keterbatasan kuantitas pelaksana pengadaan Barang/Jasa di UKPBJ dan rendahnya pemahaman proses pengadaan 	<ol style="list-style-type: none"> Terbentuknya tim koordinasi penyusunan LPPD yang lebih solid dan melibatkan seluruh SKPD terkait. Keterlibatan SKPD terkait bersama Biro Hukum dalam melakukan penyusunan dan telaah produk hukum. Otonomi daerah yang semakin baik sehingga pemerintah daerah dapat lebih leluasa dalam merumuskan kebijakan daerah. Regulasi hukum dan aturan pengadaan barang jasa yang semakin efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Terbentuknya tim koordinasi dan pelaksanaan FGD secara intensif dan



No.	Tujuan dan Sasaran Renstra Kementerian PANRB	Permasalahan Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Peningkatan efektivitas Reformasi Birokrasi Nasional.	<p>perumusan kebijakan di bidang administrasi pembangunan</p> <p>6. Belum optimalnya penyelenggaraan administrasi umum dalam mendukung pelaksanaan tugas di lingkungan Sekertariat Daerah</p> <p>7. Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi dalam meningkatkan tata laksana dan kelembagaan organisasi pada Perangkat Daerah</p> <p>8. Belum optimalnya kualitas pelayanan dan tata kelola kehumasan serta keprotokolan</p> <p>9. Belum optimalnya koordinasi dengan instansi terkait dalam perumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat</p>	<p>barang/jasa di SKPD</p> <p>5. Masih banyaknya perbedaan pemahaman dalam perumusan regulasi/ kebijakan administrasi pembangunan terkini</p> <p>6. Belum tersusunnya SOP dan SPM terkait administrasi umum secara menyeluruh</p> <p>7. Koordinasi dengan seluruh SKPD belum berjalan secara proporsional</p> <p>8. Sarana dan prasarana serta peningkatan kapasitas aparatur bidang kehumasan dan keprotokolan yang kurang memadai</p> <p>9. Minimnya partisipasi dari instansi terkait dalam perumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat</p>	<p>rutin yang melibatkan lebih banyak instansi vertikal serta SKPD terkait.</p> <p>6. Dukungan anggaran yang memadai dalam penyelenggaraan administrasi umum.</p> <p>7. Komitmen yang kuat dari seluruh SKPD dalam melaksanakan perubahan secara menyeluruh dalam menjawab tuntutan Reformasi Birokrasi</p> <p>8. Dukungan anggaran yang memadai dalam publikasi di media massa dan layanan keprotokolan</p> <p>9. Komitmen Pimpinan dan dukungan Instansi legislatif dalam peningkatan kesejahteraan rakyat dan kerukunan umat beragama</p>



2. Telaah Renstra Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

Sebagai upaya keberlanjutan untuk mewujudkan Kementerian Dalam Negeri menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa dalam lima tahun ke depan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri akan dipandu dalam visi dan misi yang akan dijabarkan berikut ini:

- Visi yaitu "Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri."
- Sedangkan untuk mencapai visi tersebut, Kemendagri menjalankan 3 (tiga) misi yaitu sebagai berikut:
 - a. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
 - b. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
 - c. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Sejalan dengan Visi dan Misi di atas, dirumuskan tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa (T1).
- b. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2).



- c. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (T3).

Dari 3 (tiga) tujuan diatas yang sangat terkait dengan pelayanan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau yaitu tujuan kedua (T2) Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi.

Sedangkan untuk mewujudkan tujuan kedua tersebut dirumuskan beberapa sasaran strategis antara lain:

- Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri.
- Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah.
- Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif.
- Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan

Tabel 3.3

**Permasalahan Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri
beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No.	Tujuan dan Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri	Permasalahan Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	<p>Tujuan 2: Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi</p> <p>Sasaran Strategis 5: Meningkatnya kapasitas dan</p>	<p>1. Belum optimalnya penyusunan Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah</p> <p>2. Belum optimalnya penyusunan produk hukum daerah yang sesuai dengan kondisi daerah dan peraturan perundang-undangan diatasnya</p>	<p>1. Kurangnya ketersediaan data di SKPD sesuai format yang dibutuhkan dalam LPPD</p> <p>2. Minimnya pemahaman SDM penyusun produk hukum dan lemahnya koordinasi</p>	<p>1. Terbentuknya tim koordinasi penyusunan LPPD yang lebih solid dan melibatkan seluruh SKPD terkait.</p> <p>2. Keterlibatan SKPD terkait bersama Biro Hukum dalam melakukan penyusunan dan</p>



No.	Tujuan dan Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri	Permasalahan Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	<p>kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri.</p> <p>Sasaran Strategis 6: Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah.</p> <p>Sasaran Strategis 7: Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif.</p> <p>Sasaran Strategis 9: Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.</p>	<p>3. Masih rendahnya koordinasi, sinkronisasi antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Instansi terkait dalam penyusunan kebijakan di bidang perekonomian daerah</p> <p>4. Belum optimalnya pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah sesuai prinsip-prinsip pengadaan</p> <p>5. Belum optimalnya koordinasi dengan instansi terkait dalam perumusan kebijakan di bidang administrasi pembangunan</p> <p>6. Belum optimalnya penyelenggaraan administrasi umum dalam mendukung pelaksanaan tugas di lingkungan Sekertariat Daerah</p> <p>7. Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi dalam meningkatkan tata laksana dan kelembagaan organisasi pada Perangkat Daerah</p> <p>8. Belum optimalnya kualitas pelayanan dan tata kelola kehumasan serta keprotokolan</p> <p>9. Belum optimalnya koordinasi dengan instansi terkait dalam</p>	<p>dengan SKPD terkait</p> <p>3. Rendahnya partisipasi instansi termasuk sektor swasta dalam perumusan kebijakan perekonomian daerah</p> <p>4. Keterbatasan kuantitas pelaksana pengadaan Barang/Jasa di UKPBJ dan rendahnya pemahaman proses pengadaan barang/jasa di SKPD</p> <p>5. Masih banyaknya perbedaan pemahaman dalam perumusan regulasi/ kebijakan administrasi pembangunan terkini</p> <p>6. Belum tersusunnya SOP dan SPM terkait administrasi umum secara menyeluruh</p> <p>7. Koordinasi dengan seluruh SKPD belum berjalan secara proporsional</p> <p>8. Sarana dan prasarana serta</p>	<p>telaah produk hukum.</p> <p>3. Otonomi daerah yang semakin baik sehingga pemerintah daerah dapat lebih leluasa dalam merumuskan kebijakan daerah.</p> <p>4. Regulasi hukum dan aturan pengadaan barang jasa yang semakin efektif, efisien, transparan dan akuntabel.</p> <p>5. Terbentuknya tim koordinasi dan pelaksanaan FGD secara intensif dan rutin yang melibatkan lebih banyak instansi vertikal serta SKPD terkait.</p> <p>6. Dukungan anggaran yang memadai dalam penyelenggaraan administrasi umum.</p> <p>7. Komitmen yang kuat dari seluruh SKPD dalam melaksanakan perubahan secara menyeluruh dalam menjawab tuntutan Reformasi Birokrasi</p> <p>8. Dukungan anggaran yang memadai dalam publikasi di media massa dan</p>



No.	Tujuan dan Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri	Permasalahan Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		perumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat	peningkatan kapasitas aparatur bidang kehumasan dan keprotokolan yang kurang memadai 9. Minimnya partisipasi dari instansi terkait dalam perumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat	layanan keprotokolan 9. Komitmen Pimpinan dan dukungan Instansi legislatif dalam peningkatan kesejahteraan rakyat dan kerukunan umat beragama

3. Telaah Renstra Kementerian Agama (Kemenag)

Sebagai kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan bidang pendidikan, Kemenag mempertimbangkan hasil capaian kinerja 5 tahun terakhir, potensi dan permasalahan yang dihadapi, serta Visi Presiden dan Wakil Presiden dalam menetapkan Visinya. Visi Kementerian Agama ditetapkan dengan merujuk pada Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”. Adapun Visi Kemenag tahun 2020-2024 sebagai berikut:

“Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong”.

Sedangkan untuk mencapai visi tersebut Kemenag menetapkan beberapa misi yaitu:



- a. Meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama;
- b. Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
- c. Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata;
- d. Meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu;
- e. Meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan; dan
- f. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Untuk mencapai keenam Misi tersebut di atas, Kemenag menetapkan enam tujuan sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial;
- b. Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
- c. Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan;
- d. Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berkualitas;
- e. Peningkatan lulusan pendidikan yang produktif dan memiliki daya saing komparatif; dan
- f. Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif.

Dalam rangka mencapai 6 (enam) Tujuan sebagaimana disebutkan di atas, Kementerian Agama menetapkan 13 Sasaran Strategis (SS) yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai Kementerian Agama pada tahun 2024 dan masing-masing indikator ketercapaian yang sekaligus menjadi indikator kinerjanya sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama.
- b. Meningkatnya moderasi beragama dan kerukunan umat beragama.
- c. Meningkatnya keselarasan relasi agama dan budaya.
- d. Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama.
- e. Meningkatnya pemanfaatan ekonomi keagamaan umat.
- f. Meningkatnya kualitas pembelajaran dan pengajaran.
- g. Meningkatnya kualitas pemerataan akses pendidikan.



- h. Meningkatnya pengelolaan dan penempatan pendidik.
- i. Meningkatnya kualitas penjaminan mutu Pendidikan.
- j. Meningkatnya kualitas mental/karakter siswa.
- k. Menguatnya pendidikan tinggi yang berkualitas.
- l. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.
- m. Meningkatnya kualitas penelitian pengembangan dan kebijakan.

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra Kemenag Tahun 2020-2024 yang saling terkait dengan permasalahan yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada tabel 3.4 dibawah ini:

Tabel 3.4

**Permasalahan Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Renstra Kementerian Agama
beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No.	Tujuan dan Sasaran Renstra Kementerian Agama	Permasalahan Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	<p>Tujuan 1: Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial</p> <p>Sasaran Strategis 1: Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama.</p> <p>Tujuan 2: Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama</p>	<p>1. Belum optimalnya penyusunan Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah</p> <p>2. Belum optimalnya penyusunan produk hukum daerah yang sesuai dengan kondisi daerah dan peraturan perundang-undangan diatasnya</p> <p>3. Masih rendahnya koordinasi, sinkronisasi antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan</p>	<p>1. Kurangnya ketersediaan data di SKPD sesuai format yang dibutuhkan dalam LPPD</p> <p>2. Minimnya pemahaman SDM penyusun produk hukum dan lemahnya koordinasi dengan SKPD terkait</p> <p>3. Rendahnya partisipasi instansi termasuk sektor swasta dalam</p>	<p>1. Terbentuknya tim koordinasi penyusunan LPPD yang lebih solid dan melibatkan seluruh SKPD terkait.</p> <p>2. Keterlibatan SKPD terkait bersama Biro Hukum dalam melakukan penyusunan dan telaah produk hukum.</p> <p>3. Otonomi daerah yang semakin baik sehingga pemerintah daerah dapat lebih leluasa</p>



No.	Tujuan dan Sasaran Renstra Kementerian Agama	Permasalahan Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	<p>Sasaran Strategis 2: Meningkatnya moderasi beragama dan kerukunan umat beragama.</p> <p>Sasaran Strategis 3: Meningkatnya keselarasan relasi agama dan budaya.</p> <p>Tujuan 3: Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan</p> <p>Sasaran Strategis 4: Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama</p> <p>Sasaran Strategis 5: Meningkatnya pemanfaatan ekonomi keagamaan umat</p> <p>Tujuan 6: Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif.</p> <p>Sasaran Strategis 12: Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel</p> <p>Sasaran Strategis 13: Meningkatnya kualitas penelitian</p>	<p>Instansi terkait dalam penyusunan kebijakan di bidang perekonomian daerah</p> <p>4. Belum optimalnya pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah sesuai prinsip-prinsip pengadaan</p> <p>5. Belum optimalnya koordinasi dengan instansi terkait dalam perumusan kebijakan di bidang administrasi pembangunan</p> <p>6. Belum optimalnya penyelenggaraan administrasi umum dalam mendukung pelaksanaan tugas di lingkungan Sekertariat Daerah</p> <p>7. Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi dalam meningkatkan tata laksana dan kelembagaan organisasi pada Perangkat Daerah</p> <p>8. Belum optimalnya kualitas pelayanan dan tata kelola kehumasan serta keprotokolan</p> <p>9. Belum optimalnya koordinasi dengan instansi terkait dalam perumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat</p>	<p>perumusan kebijakan perekonomian daerah</p> <p>4. Keterbatasan kuantitas pelaksana pengadaan Barang/Jasa di UKPBJ dan rendahnya pemahaman proses pengadaan barang/jasa di SKPD</p> <p>5. Masih banyaknya perbedaan pemahaman dalam perumusan regulasi/ kebijakan administrasi pembangunan terkini</p> <p>6. Belum tersusunnya SOP dan SPM terkait administrasi umum secara menyeluruh</p> <p>7. Koordinasi dengan seluruh SKPD belum berjalan secara proporsional</p> <p>8. Sarana dan prasarana serta peningkatan kapasitas aparatur bidang kehumasan dan keprotokolan yang kurang memadai</p>	<p>dalam merumuskan kebijakan daerah.</p> <p>4. Regulasi hukum dan aturan pengadaan barang jasa yang semakin efektif, efisien, transparan dan akuntabel.</p> <p>5. Terbentuknya tim koordinasi dan pelaksanaan FGD secara intensif dan rutin yang melibatkan lebih banyak instansi vertikal serta SKPD terkait.</p> <p>6. Dukungan anggaran yang memadai dalam penyelenggaraan administrasi umum.</p> <p>7. Komitmen yang kuat dari seluruh SKPD dalam melaksanakan perubahan secara menyeluruh dalam menjawab tuntutan Reformasi Birokrasi</p> <p>8. Dukungan anggaran yang memadai dalam publikasi di media massa dan layanan keprotokolan</p> <p>9. Komitmen Pimpinan dan dukungan Instansi legislatif dalam peningkatan</p>



No.	Tujuan dan Sasaran Renstra Kementerian Agama	Permasalahan Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	pengembangan dan kebijakan		9. Minimnya partisipasi dari instansi terkait dalam perumusan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	kesejahteraan rakyat dan kerukunan umat beragama

D. TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepulauan Riau merupakan kebijakan operasional dari RTRW Nasional yang berisi strategi pengembangan wilayah provinsi melalui optimasi pemanfaatan sumber daya, sinkronisasi pengembangan sektor, koordinasi lintas wilayah Kabupaten/Kota dan sektor koordinasi lintas wilayah Kabupaten/Kota didalam pengembangan wilayah secara keseluruhan. Operasionalisasi RTRW dijabarkan dalam rencana rinci tata ruang yang disusun dengan pendekatan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan dengan muatan substansi yang dapat mencakup hingga penetapan blok dan subblok yang dilengkapi peraturan zonasi sebagai salah satu dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 bersifat umum dan disusun berdasarkan pendekatan administratif provinsi dengan muatan substansi yang terdiri dari rencana struktur ruang wilayah dan rencana pola ruang wilayah provinsi, penetapan wilayah strategis provinsi, arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisikan indikasi program dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Provinsi Kepulauan



Riau yang mencangkup indikasi arahan peraturan zonasi, perizinan, insentif dan disinsentif serta arahan sanksi.

RTRW Provinsi Kepulauan Riau juga memuat kawasan strategis provinsi yang ditetapkan berdasarkan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan. Kawasan Strategis Provinsi ini nantinya akan lebih diberikan perhatian khusus dari Pemerintah Provinsi berkaitan dengan pembangunan di dalam kawasan tersebut. Hal ini merupakan langkah strategis Provinsi Kepulauan Riau dalam menciptakan pemerataan pertumbuhan wilayah, sehingga tujuan penataan ruang di Provinsi Kepulauan Riau dapat tercapai

Adapun kawasan strategis Provinsi Kepulauan Riau meliputi: (1) Kawasan Strategis Provinsi di Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring, Kota Tanjungpinang; (2) Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Kepulauan Anambas; (3) Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Lingga; dan (4) Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Natuna. Pengembangan kawasan strategis Provinsi diarahkan pada pengembangan potensi sektor-sektor ekonomi yang memiliki keunggulan dan daya saing Provinsi terutama pada sektor kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, pertambangan dan energi, didukung pengembangan industri maritim dan penyediaan infrastruktur yang menunjang konektivitas antar pulau dan antar Kabupaten/Kota.

Namun dalam penyelenggaraan pemerintahan, Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau memiliki tugas pokok pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah serta pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah. Terkait dengan telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau tidak memiliki program dan kegiatan yang terkait langsung dengan RTRW dan KLHS, sehingga tidak ada pembahasan secara khusus mengenai RTRW dan KLHS tersebut



E. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Sekretariat Daerah dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2021-2026 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan nasional termasuk permasalahan yang telah disampaikan sebelumnya terkait tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah. Secara umum, isu strategis yang ada di Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau antara lain adalah:

1. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan tata kelola pemerintahan.
2. Optimalisasi peran Kepala Daerah sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam membina Pemerintah Daerah dibawah wilayahnya (Kabupaten/Kota).
3. Peningkatan tata laksana organisasi yang tepat ukur dan tepat fungsi.
4. Optimalisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui peningkataan koordinasi dan konsolidasi seluruh SKPD.
5. Optimalisasi dan percepatan penyusunan/penataan produk hukum daerah.
6. Peningkatan fungsi koordinasi, sinkronisasi dan integrasi antar lembaga internal (SKPD) maupun lembaga vertikal.
7. Optimalisasi kebijakan administrasi pembangunan secara aktual.
8. Optimalisasi pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dengan sumber dana APBD dan APBN



9. Peningkatan kuantitas dan kapasitas sumberdaya aparatur pelaksana di bidang pengadaan barang/jasa.
10. Optimalisasi pelayanan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah sesuai prinsip-prinsip pengadaan.
11. Optimalisasi kinerja BUMD melalui penyusunan rekomendasi dan kebijakan di bidang perekonomian.
12. Pelaksanaan tindaklanjut rekomendasi dan kebijakan di bidang perekonomian yang sudah dihasilkan.
13. Peningkatan penyusunan perumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat
14. Optimalisasi penyelenggaraan administrasi umum dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
15. Peningkatan kualitas pelayanan dan tata kelola kehumasan dan protokoler.
16. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur dalam memahami tugas pokok dan fungsi.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

A. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Secara umum, tujuan yang ingin dicapai oleh Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau berpedoman kepada 3 (tiga) Misi yaitu Misi ke-1, Misi ke-2, dan Misi ke-4 Gubernur Kepulauan Riau yaitu:

Misi ke-1 (satu) yaitu: “Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat”.

Misi ke-2 (dua) yaitu: “Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan”.

Misi ke-4 (empat) yaitu: “Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan”.

Adapun tujuan jangka menengah yang ingin diwujudkan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam mencapai misi diatas adalah sebagai berikut:

Tujuan 1 : Percepatan Pemulihan dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi
Indikator Tujuan : Pertumbuhan ekonomi



Sasaran : Meningkatnya perekonomian daerah melalui kebijakan dan rekomendasi bidang perekonomian yang dihasilkan

Indikator Sasaran yang akan dicapai adalah persentase rekomendasi dan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti mencapai 100% di akhir tahun perencanaan

Tujuan 2 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, kuat dan antisipatif

Indikator Tujuan : Indeks Reformasi Birokrasi

Sasaran 1 : Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah yang akuntabel

- Indikator Sasaran yang akan dicapai adalah skor Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi (LPPD) mencapai 3,06 di akhir tahun perencanaan
- Indikator Sasaran yang akan dicapai adalah persentase program kegiatan Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan yang terealisasi mencapai 90% di akhir tahun perencanaan

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas produk hukum dan informasi hukum daerah

Indikator Sasaran yang akan dicapai adalah persentase produk hukum daerah yang terselesaikan mencapai 100% di akhir tahun perencanaan

Sasaran 3 : Meningkatnya capaian pembangunan daerah melalui penyusunan kebijakan administasi pembangunan

Indikator Sasaran yang akan dicapai adalah persentase kebijakan administrasi pembangunan yang disusun secara aktual mencapai 100% di akhir tahun perencanaan

Sasaran 4 : Meningkatnya capaian pelaksanaan pembangunan daerah melalui penerapan E-Procurement dalam pengadaan barang/jasa

Indikator Sasaran yang akan dicapai adalah persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif mencapai 8,6% di akhir tahun perencanaan



Sasaran 5 : Meningkatnya kualitas dan kuantitas perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukur

Indikator Sasaran yang akan dicapai adalah skor Tingkat Kematangan Perangkat Daerah dengan mencapai 44,60 di akhir tahun perencanaan

Sasaran 6 : Meningkatnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan kepada Masyarakat, Pimpinan Daerah dan Perangkat Daerah

- Indikator Sasaran yang akan dicapai adalah persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor mencapai 90% di akhir tahun perencanaan
- Indikator Sasaran yang akan dicapai adalah persentase kegiatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di luar wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang difasilitasi mencapai 90% di akhir tahun perencanaan

Tujuan 3 : Terwujudnya Pembinaan Keagamaan, Pelestarian Budaya, dan Harmoni Masyarakat

Indikator Tujuan : Indeks Kerukunan Umat Beragama

Sasaran : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan peningkatan kesejahteraan rakyat

Indikator Sasaran yang akan dicapai adalah persentase rekomendasi kebijakan peningkatan kesejahteraan rakyat yang dihasilkan mencapai 100% di akhir tahun perencanaan

Target kinerja sasaran indikator yang disusun berdasarkan tahun kinerja (2021-2026) dibuat berdasarkan tujuan yang akan dicapai, secara rinci dijabarkan melalui Tabel 4.1:



Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	FORMULA INDIKATOR (INDIKATOR TUJUAN / SASARAN)	SATUAN	KOND ISI AWAL	PROYEKSI TAHUN BERJALAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	2026
1	Percepatan Pemulihan dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		Persentase Peningkatan PAD		%	-8,85	-1,22	5,59	5,24	5,53	5,53	5,91	
		Meningkatnya perekonomian daerah melalui kebijakan dan rekomendasi bidang perekonomian yang dihasilkan	Persentase rekomendasi dan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti dibagi rekomendasi dan kebijakan bidang perekonomian yang telah disusun dikali 100	Rekomendasi dan Kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti dibagi rekomendasi dan kebijakan bidang perekonomian yang telah disusun dikali 100	%	n/a	90	90	92	93	95	100	
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih,		Indeks Reformasi Birokrasi	- Indeks Penilaian atas Capaian Reformasi	Indeks	68,57	69,17	69,77	70,37	70,97	71,57	72,17	



No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	FORMULA INDIKATOR (INDIKATOR TUJUAN / SASARAN)	SATUAN	KOND ISI AWAL	PROYEKSI TAHU N BERJALAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	2026
	kuat dan antisipatif			Birokrasi yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh Kementerian PANRB									
	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah yang akuntabel		<ul style="list-style-type: none"> - Skor Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi (LPPD) - Persentase Program Kegiatan Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan yang Terealisasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Skor yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri atas LPPD - Jumlah lokpri dalam rencana induk pengelolaan perbatasan yang terealisasi dibagi total lokpri dalam rencana induk pengelolaan perbatasan dikali 100 	Skor %	3,0221	3,0221	3,03	3,04	3,04	3,05	3,06	
		Meningkatnya kualitas produk	Persentase produk	Jumlah Produk Hukum Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	



No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	FORMULA INDIKATOR (INDIKATOR TUJUAN / SASARAN)	SATUAN	KOND ISI AWAL	PROYEKSI TAHU N BERJALAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	2026
		hukum dan informasi hukum daerah	hukum daerah yang terselesaikan	yang diselesaikan dibagi Jumlah Produk Hukum Daerah yang direncanakan dikali 100									
		Meningkatnya capaian pembangunan daerah melalui penyusunan kebijakan administrasi pembangunan	Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan yang disusun secara aktual	Kebijakan administrasi pembangunan yang disusun secara aktual dibagi seluruh kebijakan pembangunan yang disusun dikali 100	%	85	88	90	92	95	97	100	
		Meningkatnya capaian pelaksanaan pembangunan daerah melalui penerapan E-Procurement dalam pengadaan barang/jasa	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Jumlah pengadaan barang/jasa yang dilakukan dengan metode kompetitif dibagi jumlah pengadaan barang/jasa yang dilakukan tanpa metode	%	8,00	8,1	8,2	8,3	8,4	8,5	8,6	



No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	FORMULA INDIKATOR (INDIKATOR TUJUAN / SASARAN)	SATUAN	KOND ISI AWAL	PROYEKSI TAHU N BERJALAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	2026
				kompetitif dikali 100									
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukur	Tingkat Kematangan Perangkat Daerah	Total nilai PD yg tepat fungsi dan tepat ukur kelembagaannya dibagi jumlah seluruh PD dikali 100	Skor	n/a	37,10	38,60	40,10	41,60	43,10	44,60		
	Meningkatnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan kepada Masyarakat, Pimpinan Daerah dan Perangkat Daerah	- Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor - Persentase Kegiatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di luar wilayah	- Persentase kelancaran pelayanan administrasi kantor berdasarkan pendanaan yang ada dibagi pendanaan yang dibutuhkan dikali 100 - Jumlah kegiatan Pemerintah Provinsi Kepri di luar wilayah Provinsi Kepri yang	%	85	85	86	87	88	89	90		



No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	FORMULA INDIKATOR (INDIKATOR TUJUAN / SASARAN)	SATUAN	KOND ISI AWAL	PROYEKSI TAHUN BERJALAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	2026
			Provinsi Kepulauan Riau yang difasilitasi	difasilitasi dibagi jumlah seluruh kegiatan Pemerintah Provinsi Kepri di luar wilayah Provinsi Kepri dikali 100									
3	Terwujudnya Pembinaan Keagamaan, Pelestarian Budaya, dan Harmoni Masyarakat		Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks yang ditetapkan oleh Kementerian Agama berdasarkan indikator toleransi, indikator kesetaraan dan indikator kerjasama	Indeks	n/a	73,00	74,46	75,95	77,43	79,02	80,60	
		Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan peningkatan kesejahteraan rakyat	Persentase Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang dihasilkan	Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang dihasilkan dibagi Rekomendasi Kebijakan Peningkatan	%	n/a	n/a	20	40	60	80	100	



No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	FORMULA INDIKATOR (INDIKATOR TUJUAN / SASARAN)	SATUAN	KOND ISI AWAL	PROYEKSI TAHUN BERJALAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	2026
				Kesejahteraan Rakyat yang direncanakan dikali 100									



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

A. STRATEGI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi perangkat daerah dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran.

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah.

Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi perangkat daerah.

Adapun strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah secara transparan, efektif dan efisien
2. Melaksanakan percepatan penyusunan produk hukum dan informasi hukum daerah sesuai prosedur
3. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyusunan kebijakan administrasi pembangunan



4. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dalam penyusunan rekomendasi dan kebijakan perekonomian daerah.
5. Melaksanakan seluruh proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Melaksanakan penataan kelembagaan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
7. Melaksanakan penyelenggaraan administrasi umum dan layanan kepada Masyarakat, Pimpinan Daerah dan Perangkat Daerah sesuai prosedur.
8. Melaksanakan penyusunan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat dalam rangka pembinaan kerukuran umat beragama

B. ARAH KEBIJAKAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi perangkat daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

Sedangkan arah kebijakan yang diambil Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Peningkatkan fungsi koordinasi, sinkronisasi dan integrasi antar lembaga vertikal dan horizontal dalam penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah.
2. Peningkatan sistem tata kerja penyusunan produk hukum dan informasi hukum daerah serta peningkatan kapasitas aparatur penyusunan produk hukum daerah.
3. Peningkatkan fungsi koordinasi, sinkronisasi dan integrasi antar lembaga vertikal dan horizontal dalam penyusunan kebijakan administrasi pembangunan.
4. Peningkatkan fungsi koordinasi, sinkronisasi dan integrasi antar lembaga vertikal dan horizontal dalam menindaklanjuti rekomendasi dan kebijakan perekonomian yang sudah dihasilkan.
5. Peningkatkan kuantitas dan kapasitas kelembagaan serta aparatur pengadaan barang/jasa.



6. Peningkatan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan perangkat daerah dalam rangka pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi.
7. Peningkatan kualitas layanan penyelenggaraan administrasi umum, kehumasan dan keprotokolan serta penyediaan sarana dan prasarana di lingkungan Sekretariat Daerah yang memadai.
8. Peningkatan rekomendasi dan penyusunan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat serta pelaksanaan kegiatan pembinaan keagamaan di masyarakat.

Sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan menjunjung nilai-nilai budaya Melayu dan Nasional, maka untuk mewujudkan itu semua, Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau menetapkan berbagai strategi dan kebijakan diatas secara rinci dan dijabarkan dalam bentuk Tabel 5.1 di bawah ini.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI (Gubernur Kepulauan Riau) :				
" Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya "				
MISI (Gubernur Kepulauan Riau) ke-1:				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
1. Percepatan Pemulihan dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya perekonomian daerah melalui kebijakan dan rekomendasi bidang perekonomian yang dihasilkan	Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dalam penyusunan rekomendasi dan kebijakan perekonomian daerah	Peningkatkan fungsi koordinasi, sinkronisasi dan integrasi antar lembaga vertikal dan horizontal dalam menindaklanjuti rekomendasi dan kebijakan perekonomian yang sudah dihasilkan	



MISI (Gubernur Kepulauan Riau) ke-2:

Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, kuat dan antisipatif	1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah yang akuntabel	Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah secara transparan, efektif dan efisien	Peningkatkan fungsi koordinasi, sinkronisasi dan integrasi antar lembaga vertikal dan horizontal dalam penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah
	2. Meningkatnya kualitas produk hukum dan informasi hukum daerah	Melaksanakan percepatan penyusunan produk hukum dan informasi hukum daerah sesuai prosedur	Peningkatan sistem tata kerja penyusunan produk hukum dan informasi hukum daerah serta peningkatan kapasitas aparatur penyusunan produk hukum daerah
	3. Meningkatnya capaian pembangunan daerah melalui penyusunan kebijakan administiasi pembangunan	Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyusunan kebijakan administrasi pembangunan	Peningkatkan fungsi koordinasi, sinkronisasi dan integrasi antar lembaga vertikal dan horizontal dalam penyusunan kebijakan administrasi pembangunan
	4. Meningkatnya capaian pelaksanaan pembangunan daerah melalui penerapan E-Procurement dalam pengadaan barang/jasa	Melaksanakan seluruh proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai peraturan perundang-undangan	Peningkatkan kuantitas dan kapasitas kelembagaan serta aparatur pengadaan barang/jasa
	5. Meningkatnya kualitas dan kuantitas perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukur	Melaksanakan penataan kelembagaan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Peningkatan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan perangkat daerah dalam rangka pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi
	6. Meningkatnya penyelenggaraan administrasi	Melaksanakan penyelenggaraan administrasi umum	Peningkatan kualitas layanan penyelenggaraan



	pemerintahan dan kualitas pelayanan kepada Masyarakat, Pimpinan Daerah dan Perangkat Daerah	dan layanan kepada Masyarakat, Pimpinan Daerah dan Perangkat Daerah sesuai prosedur	administrasi umum, kehumasan dan keprotokolan serta penyediaan sarana dan prasarana di lingkungan Sekretariat Daerah yang memadai
MISI (Gubernur Kepulauan Riau) ke-4:			
Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
3. Terwujudnya Pembinaan Keagamaan, Pelestarian Budaya, dan Harmoni Masyarakat	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan peningkatan kesejahteraan rakyat	Melaksanakan penyusunan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat dalam rangka pembinaan kerukuran umat beragama	Peningkatan rekomendasi dan penyusunan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat serta pelaksanaan kegiatan pembinaan keagamaan di masyarakat



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam bab ini disajikan rencana program dan kegiatan/sub kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka mendukung visi dan misi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Rencana program selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan serta penganggaran. Penyusunan program dan kegiatan/sub kegiatan berdasarkan pada strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan.

Rencana program dilengkapi dengan indikator program atau *outcome* beserta target capainnya dan pagu indikatif yang mencerminkan kebutuhan anggaran dalam melaksanakan program yang direncanakan. Sedangkan untuk rencana kegiatan/sub kegiatan juga dilengkapi dengan indikator kegiatan/sub kegiatan atau *output* beserta target capainnya dan pagu indikatif. Indikator program atau *outcome* merupakan suatu keluaran yang dapat langsung digunakan atau hasil nyata dari suatu keluaran dan juga mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) dari kegiatan/sub kegiatan dalam satu program.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Ketentuan Umum Pasal 1 disebutkan bahwa:

- Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.



- Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
- Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
- Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
- Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
- Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
- Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program-program yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026, Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau membuat rencana program dan kegiatan/sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026. Rencana program, kegiatan/sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif ditampilkan sebagai berikut pada tabel 6.1:

TABEL 6.1

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif										Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi				
						Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, kuat dan antisipatif	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah yang akuntabel	Skor Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi (LPPD)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	85	85	86	1,153,544,304	87	1,253,813,671	88	1,361,323,510	89	1,441,624,097	90	1,545,307,528	90	1,545,307,528	Biro Pemerintahan dan Perbatasan	Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	n/a	0	0	-	5	10,000,000	5	10,000,000	5	11,000,000	5	12,000,000	5	12,000,000	Biro Pemerintahan dan Perbatasan	Provinsi Kepulauan Riau
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	Dokumen	n/a	0	0	-	5	10,000,000	5	10,000,000	5	11,000,000	5	12,000,000	5	12,000,000	Biro Pemerintahan dan Perbatasan	Provinsi Kepulauan Riau
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	85	85	86	21,072,000	87	20,000,000	88	22,000,000	89	25,000,000	90	27,000,000	90	27,000,000	Biro Pemerintahan dan Perbatasan	Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan	Orang	n/a	0	10	21,072,000	3	20,000,000	3	22,000,000	4	25,000,000	5	27,000,000	5	27,000,000	Biro Pemerintahan dan Perbatasan	Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Frekuensi pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	n/a	12	12	639,072,504	12	432,473,671	12	528,823,510	12	600,000,000	12	689,707,528	12	689,707,528	Biro Pemerintahan dan Perbatasan	Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Frekuensi Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bulan	n/a	12	12	27,342,650	12	18,218,000	12	19,000,000	12	20,000,000	12	21,000,000	12	21,000,000	Biro Pemerintahan dan Perbatasan	Provinsi Kepulauan Riau
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Frekuensi Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bulan	n/a	12	12	41,382,800	12	20,100,671	12	20,823,510	12	50,000,000	12	60,000,000	12	60,000,000	Biro Pemerintahan dan Perbatasan	Provinsi Kepulauan Riau
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Frekuensi Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	n/a	12	12	45,514,250	12	30,520,000	12	28,000,000	12	28,000,000	12	28,000,000	12	28,000,000	Biro Pemerintahan dan Perbatasan	Provinsi Kepulauan Riau
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Frekuensi Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bulan	n/a	12	12	48,592,804	12	8,500,000	12	10,000,000	12	12,000,000	12	15,000,000	12	15,000,000	Biro Pemerintahan dan Perbatasan	Provinsi Kepulauan Riau
			Facilitasi Kunjungan Tamu	Frekuensi Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bulan	n/a	12	12	66,335,000	12	20,135,000	12	21,000,000	12	30,000,000	12	32,000,000	12	32,000,000	Biro Pemerintahan dan Perbatasan	Provinsi Kepulauan Riau
			Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi Rapat, Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan	n/a	12	12	409,905,000	12	335,000,000	12	430,000,000	12	460,000,000	12	533,707,528	12	533,707,528	Biro Pemerintahan dan Perbatasan	Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	n/a	0	107	100,479,800	0	-	0	-	0	-	0	-	0	Biro Pemerintahan dan Perbatasan	Provinsi Kepulauan Riau	
			Pengadaan Mebel	Jumlah mebel/ruang yang diadakan	Unit	n/a	0	102	49,769,200	0	-	0	-	0	-	0	-	0	Biro Pemerintahan dan Perbatasan	Provinsi Kepulauan Riau	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD					
							2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Unit	n/a	0	5	50,710,600	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Biro Pemerintahan dan Perbatasan	Provinsi Kepulauan Riau	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Frekuensi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	n/a	12	12	336,640,000	12	713,700,000	12	734,500,000	12	734,500,000	12	734,600,000	12	734,600,000	Biro Pemerintahan dan Perbatasan	Provinsi Kepulauan Riau	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Frekuensi Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan	n/a	12	12	3,840,000	12	700,000	12	1,500,000	12	1,500,000	12	1,600,000	12	1,600,000	Biro Pemerintahan dan Perbatasan	Provinsi Kepulauan Riau	
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Frekuensi Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	n/a	12	12	37,000,000	12	37,000,000	12	37,000,000	12	37,000,000	12	37,000,000	12	37,000,000	Biro Pemerintahan dan Perbatasan	Provinsi Kepulauan Riau	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Frekuensi Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	n/a	12	12	296,000,000	12	676,000,000	12	696,000,000	12	696,000,000	12	696,000,000	12	696,000,000	Biro Pemerintahan dan Perbatasan	Provinsi Kepulauan Riau	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Frekuensi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Bulan	n/a	12	12	56,080,000	12	77,640,000	12	66,000,000	12	71,124,097	12	82,000,000	12	82,000,000	Biro Pemerintahan dan Perbatasan	Provinsi Kepulauan Riau	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Frekuensi Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	n/a	12	12	46,140,000	12	51,140,000	12	58,000,000	12	61,124,097	12	70,000,000	12	70,000,000	Biro Pemerintahan dan Perbatasan	Provinsi Kepulauan Riau	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Frekuensi Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bulan	n/a	12	12	9,940,000	12	6,500,000	12	8,000,000	12	10,000,000	12	12,000,000	12	12,000,000	Biro Pemerintahan dan Perbatasan	Provinsi Kepulauan Riau	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Frekuensi Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bulan	n/a	0	0	-	12	20,000,000	0	-	0	-	0	-	0	-	Biro Pemerintahan dan Perbatasan	Provinsi Kepulauan Riau	
			Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Skor Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi (LPPD)	Skor	3.0221	3.0221	3.03	951,828,695	3.04	939,144,212	3.04	873,040,686	3.05	1,003,603,168	3.06	1,161,085,302	3.06	1,161,085,302	Biro Pemerintahan dan Perbatasan	Provinsi Kepulauan Riau	
			Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Dokumen	n/a	0	4	324,830,495	4	270,000,000	4	270,000,000	4	313,603,168	4	412,000,000	4	412,000,000	Biro Pemerintahan dan Perbatasan	Provinsi Kepulauan Riau	
			Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Dokumen	n/a	0	1	48,499,500	1	75,000,000	1	75,000,000	1	80,000,000	1	90,000,000	1	90,000,000	Biro Pemerintahan dan Perbatasan	Provinsi Kepulauan Riau	
			Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Dokumen	n/a	0	2	186,330,995	2	120,000,000	2	120,000,000	2	150,000,000	2	230,000,000	2	230,000,000	Biro Pemerintahan dan Perbatasan	Provinsi Kepulauan Riau	
			Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Laporan Fasilitasi Penataan wilayah	Dokumen	n/a	0	1	90,000,000	1	75,000,000	1	75,000,000	1	83,603,168	1	92,000,000	1	92,000,000	Biro Pemerintahan dan Perbatasan	Provinsi Kepulauan Riau	
			Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen	n/a	0	12	328,499,300	12	349,144,212	12	378,040,686	12	440,000,000	12	469,085,302	12	469,085,302	Biro Pemerintahan dan Perbatasan	Provinsi Kepulauan Riau	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi					
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD								
							2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
							Jumlah Dokumen Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD																		
							Dokumen	n/a	0	8	48,499,300	8	70,000,000	8	75,000,000	8	75,000,000	8	91,085,302	8	Biro Pemerintahan dan Perbatasan	Provinsi Kepulauan Riau			
							Jumlah Dokumen Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan																		
							Dokumen	n/a	0	3	100,000,000	3	80,000,000	3	123,040,686	3	125,000,000	3	128,000,000	3	128,000,000	Biro Pemerintahan dan Perbatasan	Provinsi Kepulauan Riau		
							Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan																		
							Dokumen	n/a	0	1	180,000,000	1	199,144,212	1	180,000,000	1	240,000,000	1	250,000,000	1	250,000,000	Biro Pemerintahan dan Perbatasan	Provinsi Kepulauan Riau		
							Fasilitasi Kerjasama Daerah																		
							Dokumen	n/a	0	3	298,498,900	3	320,000,000	3	225,000,000	3	250,000,000	3	280,000,000	3	280,000,000	Biro Pemerintahan dan Perbatasan	Provinsi Kepulauan Riau		
							Jumlah Dokumen Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah																		
							Dokumen	n/a	0	1	148,499,500	1	170,000,000	1	75,000,000	1	90,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	Biro Pemerintahan dan Perbatasan	Provinsi Kepulauan Riau		
							Jumlah Dokumen Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta																		
							Dokumen	n/a	0	1	74,999,400	1	75,000,000	1	75,000,000	1	80,000,000	1	90,000,000	1	90,000,000	Biro Pemerintahan dan Perbatasan	Provinsi Kepulauan Riau		
							Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama																		
							Dokumen	n/a	0	1	75,000,000	1	75,000,000	1	75,000,000	1	80,000,000	1	90,000,000	1	90,000,000	Biro Pemerintahan dan Perbatasan	Provinsi Kepulauan Riau		
							Percentase Program Kegiatan Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan yang Terealisasi																		
							Program Pengelolaan Perbatasan	Percentase Program Kegiatan Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan yang Terealisasi	%	n/a	0	35	900,000,000	45	855,000,000	55	810,000,000	75	1,080,000,000	90	1,215,000,000	90	1,215,000,000	Biro Pemerintahan dan Perbatasan	Provinsi Kepulauan Riau
							Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Kerjasama Renduk, dan Renaksi Kawasan Perbatasan																	
							Dokumen	n/a	0	3	251,492,500	3	585,000,000	3	550,000,000	3	700,000,000	3	795,000,000	3	795,000,000	Biro Pemerintahan dan Perbatasan	Provinsi Kepulauan Riau		
							Koordinasi Integrasi dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi Integrasi dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah																	
							Dokumen	n/a	0	1	75,492,800	1	296,000,000	1	290,000,000	1	320,000,000	1	380,000,000	1	380,000,000	Biro Pemerintahan dan Perbatasan	Provinsi Kepulauan Riau		
							Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Rencana dan Renaksi Kawasan Perbatasan																	
							Dokumen	n/a	0	2	175,999,700	2	289,000,000	2	260,000,000	2	380,000,000	2	415,000,000	2	415,000,000	Biro Pemerintahan dan Perbatasan	Provinsi Kepulauan Riau		
							Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan																	
							Dokumen	n/a	0	4	440,938,600	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-				
							Dokumen	n/a	0	1	350,938,600	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-				
							Dokumen	n/a	0	1	30,000,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-				
							Jumlah Dokumen Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Kawasan Perbatasan																	
							Pulau	n/a	0	6	30,000,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-				
							Jumlah Pulau Terluar yang terfasilitasi																		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD					
							2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
				Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengembangan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Kajian Lokpri dan Pulau-Pulau Kecil Terluar	Dokumen	n/a	0	1	30,000,000	0	-	0	-	0	-	0	-	Biro Pemerintahan dan Perbatasan	Provinsi Kepulauan Riau		
				Monitoring dan Evaluasi	Persentase Lokasi Prioritas yang didata/dikaji dalam pengembangan Kawasan Perbatasan	%	n/a	0	100	207,568,900	100	270,000,000	100	260,000,000	100	380,000,000	100	420,000,000	100	420,000,000	Biro Pemerintahan dan Perbatasan	Provinsi Kepulauan Riau
				Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Dokumen	n/a	0	1	151,968,900	1	270,000,000	1	260,000,000	1	380,000,000	1	420,000,000	1	420,000,000	Biro Pemerintahan dan Perbatasan	Provinsi Kepulauan Riau
				Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah dokumen yang disusun	Dokumen	n/a	0	1	29,000,000	0	-	0	-	0	-	0	-	Biro Pemerintahan dan Perbatasan	Provinsi Kepulauan Riau		
										3,005,372,999		3,047,957,883		3,044,364,196		3,525,227,265		3,921,392,830		16,544,315,173		

TABEL 6.1

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD					
						2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Daerah	Frekuensi Penyediaan Rapat Koordinasi dan Komunikasi Keluar Daerah	Bulan	n/a	12	12	160,275,000	12	345,000,000	12	363,000,000	12	385,000,000	12	400,000,000	12	400,000,000	Biro Hukum	Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	n/a	n/a	11	50,000,000	0	-	4	40,000,000	0	-	6	100,000,000	6	100,000,000	Biro Hukum	Provinsi Kepulauan Riau	
		Pengadaan Mebel	Jumlah mebelier kantor yang diadakan	Unit	n/a	n/a	8	25,000,000	0	-	0	-	0	-	6	100,000,000	6	100,000,000	Biro Hukum	Provinsi Kepulauan Riau	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Unit	n/a	n/a	3	25,000,000	0	-	4	40,000,000	0	-	0	-	0	-	Biro Hukum	Provinsi Kepulauan Riau	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Frekuensi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	n/a	12	12	653,036,000	12	662,036,000	12	662,036,000	12	662,036,000	12	662,036,000	12	662,036,000	Biro Hukum	Provinsi Kepulauan Riau	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Frekuensi Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan	n/a	12	12	12,000,000	12	15,000,000	12	15,000,000	12	15,000,000	12	15,000,000	12	15,000,000	Biro Hukum	Provinsi Kepulauan Riau	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Frekuensi Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	n/a	12	12	9,506,000	12	15,506,000	12	15,506,000	12	15,506,000	12	15,506,000	12	15,506,000	Biro Hukum	Provinsi Kepulauan Riau	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Frekuensi Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	n/a	12	12	631,530,000	12	631,530,000	12	631,530,000	12	631,530,000	12	631,530,000	12	631,530,000	Biro Hukum	Provinsi Kepulauan Riau	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Frekuensi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Bulan	n/a	12	12	90,000,000	12	125,767,498	12	135,767,498	12	166,393,727	12	171,393,727	12	171,393,727	Biro Hukum	Provinsi Kepulauan Riau	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Frekuensi Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bulan	n/a	12	12	15,000,000	12	25,767,498	12	25,767,498	12	40,767,498	12	40,767,498	12	40,767,498	Biro Hukum	Provinsi Kepulauan Riau	
		Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase produk hukum daerah yang terselesaikan	%	100	100	100	1,098,737,090	100	1,035,051,138	100	966,911,212	100	1,013,137,990	100	1,075,417,181	100	1,075,417,181	Biro Hukum	Provinsi Kepulauan Riau	
		Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan	Persentase Produk Hukum daerah yang difasilitasi penyusunannya	%	n/a	100	100	789,139,000	100	720,051,139	100	696,511,212	100	708,137,990	100	750,417,181	100	750,417,181	Biro Hukum	Provinsi Kepulauan Riau	
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Persentase produk hukum pengaturan yang difasilitasi	%	n/a	100	100	315,239,000	100	235,239,000	100	215,239,000	100	225,239,000	100	240,239,000	100	240,239,000	Biro Hukum	Provinsi Kepulauan Riau	
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Persentase Produk Hukum Penetapan yang difasilitasi	%	n/a	100	100	121,900,000	100	150,912,139	100	155,900,000	100	150,912,138	100	157,912,138	100	157,912,138	Biro Hukum	Provinsi Kepulauan Riau	
		Pendokumentasiann Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Persentase Produk Hukum yang didokumentasikan	%	n/a	100	100	174,800,000	100	133,700,000	100	120,172,212	100	131,786,852	100	137,066,043	100	137,066,043	Biro Hukum	Provinsi Kepulauan Riau	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif														Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
						Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD					
						2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
				Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Percentase Ranperda Kab/Kota yang dievaluasi	%	n/a	100	100	177,200,000	100	200,200,000	100	205,200,000	100	200,200,000	100	215,200,000	100	215,200,000	Biro Hukum	Provinsi Kepulauan Riau	
					Fasilitasi Bantuan Hukum	Percentase bantuan hukum yang difasilitasi	%	n/a	100	100	309,598,090	100	315,000,000	100	270,400,000	100	305,000,000	100	325,000,000	100	325,000,000	Biro Hukum	Provinsi Kepulauan Riau
				Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Penyelesaian masalah hukum yang difasilitasi	Kasus	n/a	0	15	107,198,090	10	165,000,000	10	150,000,000	10	160,000,000	15	175,000,000	15	175,000,000	Biro Hukum	Provinsi Kepulauan Riau	
					Jumlah sengketa yang difasilitasi	Sengketa	n/a	0	5	202,400,000	5	150,000,000	5	120,400,000	5	145,000,000	5	150,000,000	5	150,000,000	Biro Hukum	Provinsi Kepulauan Riau	
									2,445,580,490		2,496,854,636		2,552,031,776		2,695,567,717		2,879,831,567		13,069,866,186				

TABEL 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Biro Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2021 - 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif														Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
						Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, kuat dan antisipatif	Meningkatnya capaian kinerja pembangunan daerah melalui penyusunan kebijakan administrasi pembangunan	Persentase Kegiatan Administrasi Pembangunan yang disusun secara aktual	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	85	85	86	1,051,378,104	87	1,143,882,840	88	1,243,037,936	89	1,314,348,819	90	1,408,359,329	90	1,408,359,329	Biro Adm Pembangunan	Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau		
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	n/a	10	7	100,407,150	6	95,000,000	6	100,000,000	6	100,000,000	6	120,000,000	6	120,000,000	Biro Adm Pembangunan	Provinsi Kepulauan Riau		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	n/a	5	2	15,000,000	2	15,000,000	2	20,000,000	2	20,000,000	2	25,000,000	2	25,000,000	Biro Adm Pembangunan	Provinsi Kepulauan Riau		
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	Dokumen	n/a	1	1	15,105,950	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Biro Adm Pembangunan	Provinsi Kepulauan Riau		
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	Dokumen	n/a	1	1	40,000,000	1	40,000,000	1	40,000,000	1	40,000,000	1	45,000,000	1	45,000,000	Biro Adm Pembangunan	Provinsi Kepulauan Riau		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	Dokumen	n/a	2	2	15,026,600	2	20,000,000	2	20,000,000	2	20,000,000	2	25,000,000	2	25,000,000	Biro Adm Pembangunan	Provinsi Kepulauan Riau		
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	n/a	1	1	15,274,600	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	Biro Adm Pembangunan	Provinsi Kepulauan Riau		
			Administrasi Kepegawaiannya Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaiannya Perangkat Daerah	%	85	85	86	74,433,976	87	85,000,000	88	50,000,000	89	100,000,000	90	65,000,000	90	65,000,000	Biro Adm Pembangunan	Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau		
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas	Stel	n/a	n/a	0	-	40	40,000,000	0	-	40	40,000,000	0	-	0	-	Biro Adm Pembangunan	Provinsi Kepulauan Riau		
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	Jumlah aparat yang mengikuti pelatihan	Orang	n/a	5	6	48,732,376	3	25,000,000	3	25,000,000	3	30,000,000	3	35,000,000	3	35,000,000	Biro Adm Pembangunan	Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau		
			Sosialisasi Peraturan dan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Sosialisasi	Orang	n/a	69	69	25,701,600	30	20,000,000	30	25,000,000	30	30,000,000	30	30,000,000	30	30,000,000	Biro Adm Pembangunan	Provinsi Kepulauan Riau		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Frekuensi pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	n/a	12	12	381,871,978	12	390,082,840	12	509,237,936	12	525,548,819	12	624,559,329	12	624,559,329	Biro Adm Pembangunan	Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Frekuensi Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bulan	n/a	12	12	28,871,978	12	25,082,840	12	39,237,936	12	45,548,819	12	50,559,329	12	50,559,329	Biro Adm Pembangunan	Provinsi Kepulauan Riau		
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Frekuensi Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	n/a	12	12	28,000,000	12	15,000,000	12	25,000,000	12	30,000,000	12	35,000,000	12	35,000,000	Biro Adm Pembangunan	Provinsi Kepulauan Riau		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD					
						2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bulan	n/a	12	12	25,000,000	12	20,000,000	12	20,000,000	12	20,000,000	12	30,000,000	12	30,000,000	Biro Adm Pembangunan	Provinsi Kepulauan Riau
				Frekuensi Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bulan	n/a	12	12	300,000,000	12	330,000,000	12	425,000,000	12	430,000,000	12	509,000,000	12	509,000,000	Biro Adm Pembangunan	Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	n/a	14	3	25,491,000	3	25,000,000	3	30,000,000	3	30,000,000	3	35,000,000	3	35,000,000	Biro Adm Pembangunan	Provinsi Kepulauan Riau
				Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Unit	n/a	14	3	25,491,000	3	25,000,000	3	30,000,000	3	30,000,000	3	35,000,000	3	35,000,000	Biro Adm Pembangunan	Provinsi Kepulauan Riau
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	n/a	12	12	420,300,000	12	493,800,000	12	493,800,000	12	493,800,000	12	493,800,000	12	493,800,000	Biro Adm Pembangunan	Provinsi Kepulauan Riau
				Frekuensi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	n/a	12	12	1,500,000	12	1,500,000	12	1,500,000	12	1,500,000	12	1,500,000	12	1,500,000	Biro Adm Pembangunan	Provinsi Kepulauan Riau
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	n/a	12	12	2,500,000	12	2,500,000	12	2,500,000	12	2,500,000	12	2,500,000	12	2,500,000	Biro Adm Pembangunan	Provinsi Kepulauan Riau
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Periengkapan Kantor	Bulan	n/a	12	12	48,000,000	12	48,000,000	12	48,000,000	12	48,000,000	12	48,000,000	12	48,000,000	Biro Adm Pembangunan	Provinsi Kepulauan Riau
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	n/a	12	12	368,300,000	12	441,800,000	12	441,800,000	12	441,800,000	12	441,800,000	12	441,800,000	Biro Adm Pembangunan	Provinsi Kepulauan Riau
				Frekuensi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Bulan	n/a	12	12	48,874,000	12	55,000,000	12	60,000,000	12	65,000,000	12	70,000,000	12	70,000,000	Biro Adm Pembangunan	Provinsi Kepulauan Riau
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	n/a	12	12	48,874,000	12	55,000,000	12	60,000,000	12	65,000,000	12	70,000,000	12	70,000,000	Biro Adm Pembangunan	Provinsi Kepulauan Riau
				Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	%	85	88	90	659,973,513	92	628,989,211	95	596,326,957	97	633,587,301	100	693,264,805	100	693,264,805	Biro Adm Pembangunan	Provinsi Kepulauan Riau
				Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	n/a	3	3	382,638,350	3	370,989,211	3	354,326,957	3	373,587,301	3	411,764,805	3	411,764,805	Biro Adm Pembangunan	Provinsi Kepulauan Riau
				Jumlah Dokumen Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Dokumen	n/a	1	1	99,994,700	1	123,000,000	1	120,000,000	1	125,000,000	1	133,500,000	1	133,500,000	Biro Adm Pembangunan	Provinsi Kepulauan Riau
				Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Dokumen	n/a	1	1	100,500,000	1	95,000,000	1	89,000,000	1	95,000,000	1	105,000,000	1	105,000,000	Biro Adm Pembangunan	Provinsi Kepulauan Riau

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD					
							2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah Dokumen Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Dokumen	n/a	1	1	182,143,650	1	152,989,211	1	145,326,957	1	153,587,301	1	173,264,805	1	173,264,805	Biro Adm Pembangunan	Provinsi Kepulauan Riau	
			Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	n/a	3	3	277,335,163	3	258,000,000	3	242,000,000	3	260,000,000	3	281,500,000	3	281,500,000	Biro Adm Pembangunan	Provinsi Kepulauan Riau	
			Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Dokumen	n/a	1	1	70,000,000	1	65,000,000	1	62,000,000	1	66,000,000	1	72,000,000	1	72,000,000	Biro Adm Pembangunan	Provinsi Kepulauan Riau	
			Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	n/a	1	1	69,999,900	1	65,000,000	1	60,000,000	1	65,500,000	1	71,500,000	1	71,500,000	Biro Adm Pembangunan	Provinsi Kepulauan Riau	
			Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Dokumen	n/a	1	1	137,335,263	1	128,000,000	1	120,000,000	1	128,500,000	1	138,000,000	1	138,000,000	Biro Adm Pembangunan	Provinsi Kepulauan Riau	
						1,711,351,617		1,772,872,051		1,839,364,893		1,947,936,120		2,101,624,134		9,373,148,815						

TABEL 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Biro Administrasi Perekonomian
Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2021 - 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif														Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
						Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD					
						2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
Percepatan Pemulihan dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya perekonomian daerah melalui kebijakan dan rekomendasi bidang perekonomian yang dihasilkan	Persentase rekomendasi kebijakan dan rekomendasi bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%																		
						85	85	86	1,053,580,728	87	1,146,252,863	88	1,245,588,081	89	1,317,092,775	90	1,411,311,826	90	1,411,311,826	Biro Adm Perekonomian	Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau		
						Tersedianya Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	n/a	1	1	25,737,650	1	5,455,800	1	10,455,800	1	11,558,000	1	12,455,800	Biro Adm Perekonomian	Provinsi Kepulauan Riau		
						Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	Dokumen	n/a	1	1	25,737,650	1	5,455,800	1	10,455,800	1	11,558,000	1	12,455,800	Biro Adm Perekonomian	Provinsi Kepulauan Riau		
						Administrasi Kepergawainan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepergawainan Perangkat Daerah	%	85	85	86	26,556,000	0	-	88	26,556,000	89	41,746,000	90	31,556,000	Biro Adm Perekonomian	Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau	
						Jumlah Pakaian Dinas	Jumlah Pakaian Dinas	Stel	n/a	0	20	16,140,000	0	-	20	16,140,000	60	31,720,000	20	16,140,000	Biro Adm Perekonomian	Provinsi Kepulauan Riau	
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan	Orang	n/a	0	3	10,416,000	0	-	3	10,416,000	3	10,026,000	4	15,416,000	Biro Adm Perekonomian	Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau	
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Frekuensi penuhnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	n/a	12	12	366,482,570	12	490,568,063	12	549,067,370	12	589,784,975	12	676,811,375	Biro Adm Perekonomian	Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau	
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Frekuensi Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bulan	n/a	12	12	14,549,000	12	12,474,000	12	15,474,000	12	20,474,000	12	32,500,400	Biro Adm Perekonomian	Provinsi Kepulauan Riau	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Frekuensi Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bulan	n/a	12	12	21,681,370	12	64,121,370	12	74,121,370	12	80,121,370	12	85,121,370	Biro Adm Perekonomian	Provinsi Kepulauan Riau	
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Frekuensi Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bulan	n/a	12	12	15,776,000	12	10,432,000	12	10,432,000	12	10,432,000	12	10,432,000	Biro Adm Perekonomian	Provinsi Kepulauan Riau	
						Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi Rapat, Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan	n/a	12	12	314,476,200	12	403,540,693	12	449,040,000	12	478,757,605	12	548,757,605	Biro Adm Perekonomian	Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau	
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	n/a	0	18	56,411,000	12	16,519,000	12	20,056,000	12	19,343,800	12	30,056,000	Biro Adm Perekonomian	Provinsi Kepulauan Riau	
						Pengadaan Mebel	Jumlah mebel/leir kantor yang diadakan	Unit	n/a	0	11	31,411,000	10	9,856,000	10	9,856,000	10	9,856,000	10	14,856,000	Biro Adm Perekonomian	Provinsi Kepulauan Riau	
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Unit	n/a	0	7	25,000,000	2	6,663,000	2	10,200,000	2	9,487,800	2	15,200,000	Biro Adm Perekonomian	Provinsi Kepulauan Riau	
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Frekuensi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	n/a	12	12	469,757,788	12	558,550,000	12	564,100,000	12	573,600,000	12	573,600,000	Biro Adm Perekonomian	Provinsi Kepulauan Riau	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD					
						2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Frekuensi Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan	n/a	12	12	4,200,000	12	1,500,000	12	2,050,000	12	2,550,000	12	2,550,000	12	2,550,000	Biro Adm Perekonomian	Provinsi Kepulauan Riau
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Frekuensi Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	n/a	12	12	20,000,000	12	7,000,000	12	12,000,000	12	21,000,000	12	21,000,000	12	21,000,000	Biro Adm Perekonomian	Provinsi Kepulauan Riau
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Frekuensi Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	n/a	12	12	96,000,000	12	48,000,000	12	48,000,000	12	48,000,000	12	48,000,000	12	48,000,000	Biro Adm Perekonomian	Provinsi Kepulauan Riau
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Frekuensi Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	n/a	12	12	349,557,788	12	502,050,000	12	502,050,000	12	502,050,000	12	502,050,000	12	502,050,000	Biro Adm Perekonomian	Provinsi Kepulauan Riau
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Frekuensi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Bulan	n/a	12	12	108,635,720	12	75,160,000	12	75,352,911	12	81,060,000	12	86,832,651	12	86,832,651	Biro Adm Perekonomian	Provinsi Kepulauan Riau
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Frekuensi Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	n/a	12	12	74,135,720	12	70,560,000	12	70,560,000	12	72,560,000	12	75,560,000	12	75,560,000	Biro Adm Perekonomian	Provinsi Kepulauan Riau
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Frekuensi Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bulan	n/a	12	12	34,500,000	12	4,600,000	12	4,792,911	12	8,500,000	12	11,272,651	12	11,272,651	Biro Adm Perekonomian	Provinsi Kepulauan Riau
			Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase rekomendasi dan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	%	N/A	90	90	945,240,704	92	920,741,033	93	1,193,565,903	95	814,963,138	100	845,994,952	100	845,994,952	Biro Adm Perekonomian	Provinsi Kepulauan Riau
			Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Jumlah rekomendasi kebijakan bidang Perekonomian yang disusun	Rekomendasi	n/a	4	4	212,592,104	4	205,800,167	4	267,134,609	4	183,001,870	4	189,840,400	4	189,840,400	Biro Adm Perekonomian	Provinsi Kepulauan Riau
			Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Rekomendasi dan Kebijakan Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro Yang Disusun	Dokumen	n/a	2	2	104,383,504	2	104,198,867	2	134,017,109	2	92,550,420	2	95,850,600	2	95,850,600	Biro Adm Perekonomian	Provinsi Kepulauan Riau
			Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Rekomendasi dan Kebijakan Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro Yang Disusun	Dokumen	n/a	2	2	108,208,600	2	101,601,300	2	133,117,500	2	90,451,450	2	93,989,800	2	93,989,800	Biro Adm Perekonomian	Provinsi Kepulauan Riau
			Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Jumlah rekomendasi dan kebijakan bidang sumberdaya alam yang disusun	Rekomendasi	n/a	3	6	327,402,800	6	305,718,289	6	400,528,850	6	272,402,410	6	277,468,500	6	277,468,500	Biro Adm Perekonomian	Provinsi Kepulauan Riau
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Rekomendasi dan Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan yang disusun	Dokumen	n/a	1	2	105,151,320	2	101,304,530	2	133,214,400	2	90,350,460	2	92,909,300	2	92,909,300	Biro Adm Perekonomian	Provinsi Kepulauan Riau
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Rekomendasi dan Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup yang disusun	Dokumen	n/a	1	2	109,659,940	2	104,105,559	2	134,101,600	2	90,551,450	2	91,959,800	2	91,959,800	Biro Adm Perekonomian	Provinsi Kepulauan Riau
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Rekomendasi dan Kebijakan Energi dan Air yang disusun	Dokumen	n/a	1	2	112,591,540	2	100,308,200	2	133,212,850	2	91,500,500	2	92,599,400	2	92,599,400	Biro Adm Perekonomian	Provinsi Kepulauan Riau

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD					
							2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Kebijakan BUMD dan BLUD yang disusun	Dokumen	n/a	3	7	405,245,800	7	409,222,577	7	525,902,444	7	359,558,858	7	378,686,052	7	378,686,052	Biro Admin Perekonomian	Provinsi Kepulauan Riau		
		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha yang disusun	Dokumen	n/a	1	4	119,341,380	4	174,609,118	4	263,485,235	4	178,657,258	4	188,786,113	4	188,786,113	Biro Admin Perekonomian	Provinsi Kepulauan Riau		
		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi yang disusun	Dokumen	n/a	1	2	173,349,440	2	130,309,459	2	130,017,109	2	90,350,200	2	95,900,500	2	95,900,500	Biro Admin Perekonomian	Provinsi Kepulauan Riau		
		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah yang disusun	Dokumen	n/a	1	1	112,554,980	1	104,304,000	1	132,400,100	1	90,551,400	1	93,999,439	1	93,999,439	Biro Admin Perekonomian	Provinsi Kepulauan Riau		
						1,998,821,432		2,066,993,896		2,439,153,984		2,132,055,913		2,257,306,778		10,894,332,003						

TABEL 6.1

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif														Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi		
						Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD					
						2020	2021	Target	Rp	Target	Rp												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, kuat dan antisipatif	Meningkatnya capaian pelaksanaan pembangunan daerah melalui penerapan E-Procurement dalam pengadaan barang/jasa	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Pelayanan Administrasi Daerah Provinsi	Persentase Tingkat Kelancaran Adminstrasi Kantor	% %	85 85	85 86	1,960,105,503 2,121,673,521	87 88	2,295,140,708 2,446,411,402	89 90	2,626,458,669 2,626,458,669	90 90	2,626,458,669 2,626,458,669	90 90	2,626,458,669 2,626,458,669	90 90	2,626,458,669 2,626,458,669	Biro Pengadaan Barang/Jasa Biro Pengadaan Barang/Jasa	Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD					
						2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Biro Pengadaan Barang/Jasa	Provinsi Kepulauan Riau	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Frekuensi Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Bulan	n/a	12	12	10,560,000	12	10,000,000	12	10,000,000	12	10,000,000	12	10,000,000	12	10,000,000	Biro Pengadaan Barang/Jasa	Provinsi Kepulauan Riau
			Facilitasi Kunjungan Tamu	Frekuensi Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bulan	n/a	12	12	20,000,000	12	6,000,000	12	7,000,000	12	10,000,000	12	12,000,000	12	12,000,000	Biro Pengadaan Barang/Jasa	Provinsi Kepulauan Riau
			Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi Rapat, Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan	n/a	12	12	315,577,000	12	150,000,000	12	250,000,000	12	250,000,000	12	311,000,000	12	311,000,000	Biro Pengadaan Barang/Jasa	Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	n/a	23	0	-	6	30,000,000	6	30,000,000	6	30,000,000	6	30,000,000	6	30,000,000	Biro Pengadaan Barang/Jasa	Provinsi Kepulauan Riau
			Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang Diadakan	Unit	n/a	20	0	-	2	10,000,000	2	10,000,000	2	10,000,000	2	10,000,000	2	10,000,000	Biro Pengadaan Barang/Jasa	Provinsi Kepulauan Riau
			Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Unit	n/a	1	0	-	2	10,000,000	2	10,000,000	2	10,000,000	2	10,000,000	2	10,000,000	Biro Pengadaan Barang/Jasa	Provinsi Kepulauan Riau
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang Diadakan	Unit	n/a	2	0	-	2	10,000,000	2	10,000,000	2	10,000,000	2	10,000,000	2	10,000,000	Biro Pengadaan Barang/Jasa	Provinsi Kepulauan Riau
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Frekuensi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	n/a	12	12	1,068,198,093	12	1,728,090,000	12	1,728,090,000	12	1,729,090,000	12	1,730,090,000	12	1,730,090,000	Biro Pengadaan Barang/Jasa	Provinsi Kepulauan Riau
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Frekuensi Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan	n/a	12	12	2,000,000	12	5,000,000	12	5,000,000	12	6,000,000	12	7,000,000	12	7,000,000	Biro Pengadaan Barang/Jasa	Provinsi Kepulauan Riau
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Frekuensi Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	n/a	12	12	25,000,000	12	35,590,000	12	35,590,000	12	35,590,000	12	35,590,000	12	35,590,000	Biro Pengadaan Barang/Jasa	Provinsi Kepulauan Riau
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Frekuensi Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	n/a	12	12	28,800,000	12	28,800,000	12	28,800,000	12	28,800,000	12	28,800,000	12	28,800,000	Biro Pengadaan Barang/Jasa	Provinsi Kepulauan Riau
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Frekuensi Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	n/a	12	12	1,012,398,093	12	1,658,700,000	12	1,658,700,000	12	1,658,700,000	12	1,658,700,000	12	1,658,700,000	Biro Pengadaan Barang/Jasa	Provinsi Kepulauan Riau
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Frekuensi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Bulan	n/a	12	12	287,359,010	12	75,000,000	12	85,050,708	12	145,321,402	12	155,368,669	12	155,368,669	Biro Pengadaan Barang/Jasa	Provinsi Kepulauan Riau
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Frekuensi Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	n/a	12	12	61,630,000	12	35,000,000	12	40,000,000	12	45,000,000	12	50,000,000	12	50,000,000	Biro Pengadaan Barang/Jasa	Provinsi Kepulauan Riau
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Frekuensi Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bulan	n/a	12	12	31,780,000	12	5,000,000	12	10,000,000	12	15,000,000	12	20,000,000	12	20,000,000	Biro Pengadaan Barang/Jasa	Provinsi Kepulauan Riau
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Frekuensi Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bulan	n/a	12	12	96,254,610	12	35,000,000	12	35,050,708	12	85,321,402	12	85,368,669	12	85,368,669	Biro Pengadaan Barang/Jasa	Provinsi Kepulauan Riau
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Frekuensi Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bulan	n/a	12	12	97,694,400	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Biro Pengadaan Barang/Jasa	Provinsi Kepulauan Riau

TABEL 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Biro Organisasi dan Korporasi
Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2021 - 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
						Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						2020	2021	Target	Rp												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, kuat dan antisipatif	Meningkatnya kualitas dan kuantitas perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukur	Tingkat Kematangan Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Percentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	85	85	86	1,075,852,800	87	1,170,217,613	88	1,271,374,151	89	1,344,838,587	90	1,441,166,319	90	1,441,166,319	Biro Organisasi dan Korpri	Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	n/a	0	5	50,372,000	5	70,372,000	5	70,372,000	5	80,372,000	5	80,372,000	5	80,372,000	Biro Organisasi dan Korpri	Provinsi Kepulauan Riau
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	Dokumen	n/a	0	5	50,372,000	5	70,372,000	5	70,372,000	5	80,372,000	5	80,372,000	5	80,372,000	Biro Organisasi dan Korpri	Provinsi Kepulauan Riau
			Administrasi Kepergawainan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepergawainan Perangkat Daerah	%	85	85	86	49,270,000	87	89,186,000	88	89,186,000	89	89,186,000	90	89,186,000	90	89,186,000	Biro Organisasi dan Korpri	Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pegawai yang diberikan atribut	Unit	n/a	1011	200	49,270,000	360	88,686,000	360	88,686,000	360	88,686,000	360	88,686,000	360	88,686,000	Biro Organisasi dan Korpri	Provinsi Kepulauan Riau
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yg mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Orang	n/a	1	0	-	1	500,000	1	500,000	1	500,000	1	500,000	1	500,000	Biro Organisasi dan Korpri	Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Frekuensi pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	n/a	12	12	459,612,201	12	488,112,201	12	602,368,739	12	639,733,175	12	726,060,907	12	726,060,907	Biro Organisasi dan Korpri	Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Frekuensi Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bulan	n/a	12	12	30,520,881	12	50,520,881	12	50,520,881	12	62,781,412	12	63,365,682	12	63,365,682	Biro Organisasi dan Korpri	Provinsi Kepulauan Riau
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Frekuensi Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	n/a	12	12	11,981,045	12	14,981,045	12	14,981,045	12	34,084,950	12	34,084,950	12	34,084,950	Biro Organisasi dan Korpri	Provinsi Kepulauan Riau
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Frekuensi Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bulan	n/a	12	12	12,400,000	12	17,400,000	12	17,400,000	12	23,400,000	12	23,400,000	12	23,400,000	Biro Organisasi dan Korpri	Provinsi Kepulauan Riau
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Frekuensi Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bulan	n/a	0	0	-	12	500,000	12	500,000	12	500,000	12	500,000	12	500,000	Biro Organisasi dan Korpri	Provinsi Kepulauan Riau
			Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi Rapat, Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan	n/a	12	12	404,710,275	12	404,710,275	12	518,966,813	12	518,966,813	12	604,710,275	12	604,710,275	Biro Organisasi dan Korpri	Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	n/a	12	2	15,100,000	2	15,600,000	1	2,500,000	2	15,600,000	2	15,600,000	2	15,600,000	Biro Organisasi dan Korpri	Provinsi Kepulauan Riau
			Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	Unit	n/a	1	0	-	1	500,000	1	500,000	1	500,000	1	500,000	1	500,000	Biro Organisasi dan Korpri	Provinsi Kepulauan Riau
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Unit	n/a	12	2	15,100,000	2	15,100,000	1	2,000,000	2	15,100,000	2	15,100,000	2	15,100,000	Biro Organisasi dan Korpri	Provinsi Kepulauan Riau

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD					
							2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah dokumen Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Dokumen	n/a	1	1	171,524,871	1	185,000,000	1	175,000,000	1	180,000,000	1	185,000,000	1	185,000,000	Biro Organisasi dan Korpri	Provinsi Kepulauan Riau		
								2,286,743,452		2,566,124,601		2,548,739,932		2,663,385,132		2,826,510,861		12,891,503,978				

TABEL 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Biro Umum
Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2021 - 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
						Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						2020	2021	Target	Rp	Target	Rp										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, kuat dan antisipatif	Meningkatnya penyelepasan administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan kepada Masyarakat, Pimpinan Daerah dan Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	85	85	86	134,266,781,261	87	135,115,515,918	88	143,417,078,869	89	152,281,239,026	90	161,801,051,863	90	161,801,051,863	Biro Umum	Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	n/a	0	5	57,334,645	5	57,334,645	5	57,334,645	5	64,068,244	5	71,756,433	5	71,756,433	Biro Umum	Provinsi Kepulauan Riau
			Koordinasi dan Penyampaian Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	Dokumen	n/a	0	5	57,334,645	5	57,334,645	5	57,334,645	5	64,068,244	5	71,756,433	5	71,756,433	Biro Umum	Provinsi Kepulauan Riau
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	%	n/a	100	100	74,452,651,920	100	74,456,956,260	100	74,456,956,260	100	74,531,939,641	100	75,197,750,110	100	75,197,750,110	Biro Umum	Provinsi Kepulauan Riau
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Frekuensi Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	Tahun	n/a	1	1	67,508,850,455	1	67,508,850,455	1	67,508,850,455	1	67,508,850,455	1	68,089,047,502	1	68,089,047,502	Biro Umum	Provinsi Kepulauan Riau
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Frekuensi Pemenuhan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tahun	n/a	1	1	6,309,644,000	1	6,309,644,000	1	6,309,644,000	1	6,309,644,000	1	6,309,644,000	1	6,309,644,000	Biro Umum	Provinsi Kepulauan Riau
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Frekuensi Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	n/a	12	12	243,978,465	12	243,978,465	12	243,978,465	12	272,632,223	12	305,348,090	12	305,348,090	Biro Umum	Provinsi Kepulauan Riau
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Frekuensi Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Bulan	n/a	12	12	175,179,000	12	394,483,340	12	394,483,340	12	440,812,962	12	493,710,518	12	493,710,518	Biro Umum	Provinsi Kepulauan Riau
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang telah dikordinasikan dan tersusun	Dokumen	n/a	1	1	75,000,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Biro Umum	Provinsi Kepulauan Riau
			Pengelolaan dan Penyampaian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan Pengelolaan dan Penyampaian Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang disusun	Dokumen	n/a	1	1	55,000,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Biro Umum	Provinsi Kepulauan Riau
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD yang telah dikordinasikan dan tersusun	Dokumen	n/a	1	1	85,000,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Biro Umum	Provinsi Kepulauan Riau
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah teradministrasi dengan baik	%	n/a	100	100	874,695,505	100	874,695,505	100	874,695,505	100	977,423,069	100	1,094,713,837	100	1,094,713,837	Biro Umum	Provinsi Kepulauan Riau

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi		
						Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						2020	2021	Target	Rp												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun	Dokumen	n/a	1	1	41,780,730	1	41,780,730	1	41,780,730	1	46,687,618	1	52,290,132	1	52,290,132	Biro Umum	Provinsi Kepulauan Riau
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Frekuensi Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Bulan	n/a	12	12	480,582,280	12	480,582,280	12	480,582,280	12	537,023,689	12	601,466,532	12	601,466,532	Biro Umum	Provinsi Kepulauan Riau
			Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Peserta Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Orang	n/a	50	50	55,516,855	50	55,516,855	50	55,516,855	50	62,036,965	50	69,481,401	50	69,481,401	Biro Umum	Provinsi Kepulauan Riau
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang telah direkonsiliasi dan disusun	Dokumen	n/a	4	4	35,896,810	4	35,896,810	4	35,896,810	4	40,112,668	4	44,926,188	4	44,926,188	Biro Umum	Provinsi Kepulauan Riau
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Frekuensi Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bulan	n/a	12	12	260,918,830	12	260,918,830	12	260,918,830	12	291,562,129	12	326,549,584	12	326,549,584	Biro Umum	Provinsi Kepulauan Riau
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	85	85	86	617,904,829	87	402,248,329	88	402,248,329	89	449,489,901	90	503,428,689	90	503,428,689	Biro Umum	Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai yang diadakan	Unit	n/a	n/a	6	80,903,110	6	80,903,110	6	80,903,110	6	90,404,679	6	101,253,240	6	101,253,240	Biro Umum	Provinsi Kepulauan Riau
			Pengadaan Pakaiian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaiian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	Stel	n/a	400	350	158,000,000	350	158,000,000	350	158,000,000	370	176,556,120	380	197,742,855	380	197,742,855	Biro Umum	Provinsi Kepulauan Riau
			Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	n/a	1	1	37,192,805	1	37,192,805	1	37,192,805	1	41,560,869	1	46,548,174	1	46,548,174	Biro Umum	Provinsi Kepulauan Riau
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Orang	n/a	0	15	41,475,000	15	41,475,000	15	41,475,000	15	46,345,982	15	51,907,499	15	51,907,499	Biro Umum	Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Orang	n/a	70	70	215,656,500	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Biro Umum	Provinsi Kepulauan Riau
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Orang	n/a	0	60	84,677,414	60	84,677,414	60	84,677,414	70	94,622,251	80	105,976,921	80	105,976,921	Biro Umum	Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Frekuensi pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	n/a	12	12	13,404,166,875	12	13,404,166,875	12	15,504,166,875	12	16,638,342,943	12	18,634,944,096	12	18,634,944,096	Biro Umum	Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit	n/a	0	2974	1,201,515,687	1000	1,201,515,687	1200	1,701,515,687	1300	1,901,348,155	1300	2,129,509,933	1300	2,129,509,933	Biro Umum	Provinsi Kepulauan Riau
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bulan	n/a	12	12	399,297,600	12	399,297,600	12	399,297,600	12	446,192,627	12	499,735,743	12	499,735,743	Biro Umum	Provinsi Kepulauan Riau
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bulan	n/a	12	12	6,261,569,083	12	6,261,569,083	12	7,661,569,083	12	7,876,467,184	12	8,821,643,246	12	8,821,643,246	Biro Umum	Provinsi Kepulauan Riau
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	n/a	12	12	255,049,130	12	255,049,130	12	255,049,130	12	285,003,069	12	319,203,437	12	319,203,437	Biro Umum	Provinsi Kepulauan Riau

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif														Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi		
						Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD					
						2020	2021	Target	Rp	Target	Rp												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Frekuensi Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bulan	n/a	12	12	62,139,899	12	62,139,899	12	62,139,899	12	69,437,845	12	77,770,386	12	77,770,386	Biro Umum	Provinsi Kepulauan Riau		
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Frekuensi Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bulan	n/a	12	12	3,869,013,786	12	3,869,013,786	12	4,069,013,786	12	4,546,894,228	12	5,092,521,535	12	5,092,521,535	Biro Umum	Provinsi Kepulauan Riau		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan	n/a	12	12	1,069,641,435	12	1,069,641,435	12	1,069,641,435	12	1,195,264,190	12	1,338,695,893	12	1,338,695,893	Biro Umum	Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau		
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Frekuensi Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Bulan	n/a	12	12	248,284,755	12	248,284,755	12	248,284,755	12	277,444,260	12	310,737,571	12	310,737,571	Biro Umum	Provinsi Kepulauan Riau		
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Frekuensi Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Bulan	n/a	12	12	37,655,500	12	37,655,500	12	37,655,500	12	40,291,385	12	45,126,351	12	45,126,351	Biro Umum	Provinsi Kepulauan Riau		
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	n/a	0	328	2,321,338,505	250	299,338,505	250	299,338,505	300	334,493,957	300	374,633,231	300	374,633,231	Biro Umum	Provinsi Kepulauan Riau		
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan	Unit	n/a	0	3	717,000,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Biro Umum	Provinsi Kepulauan Riau		
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	Unit	n/a	12	5	1,305,000,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Biro Umum	Provinsi Kepulauan Riau		
			Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	Unit	n/a	352	320	299,338,505	250	299,338,505	250	299,338,505	300	334,493,957	300	374,633,231	300	374,633,231	Biro Umum	Provinsi Kepulauan Riau		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Frekuensi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	n/a	12	12	23,474,131,589	12	24,174,131,589	12	28,174,131,589	12	31,684,843,676	12	35,408,911,360	12	35,408,911,360	Biro Umum	Provinsi Kepulauan Riau		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Frekuensi Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan	n/a	12	12	527,811,008	12	527,811,008	12	527,811,008	12	589,799,138	12	660,575,035	12	660,575,035	Biro Umum	Provinsi Kepulauan Riau		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Frekuensi Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	n/a	12	12	7,811,355,799	12	7,811,355,799	12	7,811,355,799	12	7,811,355,799	12	8,670,604,937	12	8,670,604,937	Biro Umum	Provinsi Kepulauan Riau		
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Frekuensi Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	n/a	12	12	1,980,917,480	12	2,680,917,480	12	4,680,917,480	12	5,230,662,216	12	5,858,341,682	12	5,858,341,682	Biro Umum	Provinsi Kepulauan Riau		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Frekuensi Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	n/a	12	12	13,154,047,302	12	13,154,047,302	12	15,154,047,302	12	18,053,026,523	12	20,219,389,705	12	20,219,389,705	Biro Umum	Provinsi Kepulauan Riau		
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Frekuensi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara	Bulan	n/a	12	12	10,108,781,915	12	11,908,781,915	12	13,510,344,866	12	16,661,472,427	12	18,660,849,118	12	18,660,849,118	Biro Umum	Provinsi Kepulauan Riau		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Frekuensi Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	n/a	12	12	493,685,931	12	493,685,931	12	493,685,931	12	551,666,283	12	617,866,237	12	617,866,237	Biro Umum	Provinsi Kepulauan Riau		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Frekuensi Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bulan	n/a	12	12	4,058,470,095	12	4,458,470,095	12	5,458,470,095	12	6,099,533,566	12	6,831,477,593	12	6,831,477,593	Biro Umum	Provinsi Kepulauan Riau		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif													Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
						Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						2020	2021	Target	Rp	Target	Rp										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang terpelihara	Bulan	n/a	12	12	154,011,290	12	154,011,290	12	154,011,290	12	172,098,961	12	192,750,836	12	192,750,836	Biro Umum	Provinsi Kepulauan Riau	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Frekuensi Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bulan	n/a	12	12	2,174,042,781	12	2,974,042,781	12	3,575,605,732	12	4,442,515,976	12	4,975,617,894	12	4,975,617,894	Biro Umum	Provinsi Kepulauan Riau	
		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Frekuensi Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Bulan	n/a	12	12	586,662,947	12	586,662,947	12	586,662,947	12	655,562,873	12	734,230,417	12	734,230,417	Biro Umum	Provinsi Kepulauan Riau	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Frekuensi Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bulan	n/a	12	12	2,641,908,871	12	3,241,908,871	12	3,241,908,871	12	4,740,094,768	12	5,308,906,140	12	5,308,906,140	Biro Umum	Provinsi Kepulauan Riau	
		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Frekuensi Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tepat waktu	Bulan	n/a	12	12	3,565,394,332	12	3,565,394,332	12	3,565,394,332	12	3,594,801,593	12	3,628,377,784	12	3,628,377,784	Biro Umum	Provinsi Kepulauan Riau	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Frekuensi Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tahun	n/a	1	1	315,000,000	1	315,000,000	1	315,000,000	1	315,000,000	1	315,000,000	1	315,000,000	Biro Umum	Provinsi Kepulauan Riau	
		Penyediaan Pakaihan Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Frekuensi Penyediaan Pakaihan Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bulan	n/a	12	12	139,237,382	12	139,237,382	12	139,237,382	12	155,589,949	12	174,260,743	12	174,260,743	Biro Umum	Provinsi Kepulauan Riau	
		Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Frekuensi Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bulan	n/a	12	12	111,156,950	12	111,156,950	12	111,156,950	12	124,211,645	12	139,117,042	12	139,117,042	Biro Umum	Provinsi Kepulauan Riau	
		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Frekuensi Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bulan	n/a	12	12	3,000,000,000	12	3,000,000,000	12	3,000,000,000	12	3,000,000,000	12	3,000,000,000	12	3,000,000,000	Biro Umum	Provinsi Kepulauan Riau	
		Fasilitasi Kerumah tanggaan Sekretariat Daerah	Frekuensi Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah	Bulan	n/a	12	12	4,844,043,577	12	5,226,130,394	12	5,826,130,394	12	6,510,373,287	12	7,291,618,081	12	7,291,618,081	Biro Umum	Provinsi Kepulauan Riau	
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Frekuensi Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Bulan	n/a	12	12	2,231,814,267	12	2,273,901,084	12	2,473,901,084	12	2,764,445,429	12	3,096,178,880	12	3,096,178,880	Biro Umum	Provinsi Kepulauan Riau	
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Frekuensi Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Bulan	n/a	12	12	1,698,733,028	12	1,738,733,028	12	1,938,733,028	12	2,166,425,202	12	2,426,396,226	12	2,426,396,226	Biro Umum	Provinsi Kepulauan Riau	
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Frekuensi Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Bulan	n/a	12	12	913,496,282	12	1,213,496,282	12	1,413,496,282	12	1,579,502,657	12	1,769,042,975	12	1,769,042,975	Biro Umum	Provinsi Kepulauan Riau	
		Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Frekuensi Pemenuhan Kebutuhan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Bulan	n/a	12	12	546,337,569	12	746,337,569	12	746,337,569	12	833,990,289	12	934,069,124	12	934,069,124	Biro Umum	Provinsi Kepulauan Riau	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif														Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi		
						Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD					
						2020	2021	Target	Rp	Target	Rp												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
			Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Frekuensi Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Bulan	n/a	12	12	546,337,569	12	746,337,569	12	746,337,569	12	833,990,289	12	934,069,124	12	934,069,124	Biro Umum	Provinsi Kepulauan Riau		
									134,266,781,261		135,115,515,918		143,417,078,869		152,281,239,026		161,801,051,863		726,881,666,936				

TABEL 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Biro Humas, Protokol dan Penghubungan
Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2021 - 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif										Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi		
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD					
						2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, kuat dan antisipatif	Meningkatnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan kepada Masyarakat, Pimpinan Daerah dan Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Percentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	85	85	86	26,699,299,355	87	27,267,375,762	88	29,351,074,935	89	31,568,934,051	90	34,003,571,415	90	34,003,571,415	Biro Humas Protokol Penghubung	Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	n/a	2	9	900,000,000	9	925,000,000	9	975,000,000	9	925,000,000	9	1,080,000,000	9	1,080,000,000	Biro Humas Protokol Penghubung	Provinsi Kepulauan Riau
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	n/a	n/a	5	250,000,000	5	250,000,000	5	250,000,000	5	250,000,000	5	300,000,000	5	300,000,000	Biro Humas Protokol Penghubung	Provinsi Kepulauan Riau
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	Dokumen	n/a	n/a	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	175,000,000	1	175,000,000	Biro Humas Protokol Penghubung	Provinsi Kepulauan Riau
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	Dokumen	n/a	n/a	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	175,000,000	1	175,000,000	Biro Humas Protokol Penghubung	Provinsi Kepulauan Riau
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	Dokumen	n/a	2	2	200,000,000	2	225,000,000	2	250,000,000	2	225,000,000	2	250,000,000	2	250,000,000	Biro Humas Protokol Penghubung	Provinsi Kepulauan Riau
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	n/a	n/a	1	150,000,000	1	150,000,000	1	175,000,000	1	150,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	Biro Humas Protokol Penghubung	Provinsi Kepulauan Riau
			Administrasi Kepegawai	Terlaksananya Administrasi Kepegawai Perangkat Daerah	%	85	85	86	1,150,000,000	87	1,150,000,000	88	900,000,000	89	1,310,000,000	90	1,325,000,000	90	1,325,000,000	Biro Humas Protokol Penghubung	Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas	Stel	n/a	n/a	300	300,000,000	300	300,000,000	0	-	300	300,000,000	0	-	0	-	Biro Humas Protokol Penghubung	Provinsi Kepulauan Riau
			Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	n/a	n/a	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	Biro Humas Protokol Penghubung	Provinsi Kepulauan Riau
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawai	Jumlah Laporan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawai	Dokumen	n/a	n/a	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	Biro Humas Protokol Penghubung	Provinsi Kepulauan Riau
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan	Orang	n/a	0	50	300,000,000	50	300,000,000	50	300,000,000	60	360,000,000	70	420,000,000	70	420,000,000	Biro Humas Protokol Penghubung	Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau
			Sosialisasi Peraturan dan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Sosialisasi	Orang	n/a	0	100	250,000,000	100	250,000,000	100	300,000,000	100	350,000,000	150	525,000,000	150	525,000,000	Biro Humas Protokol Penghubung	Provinsi Kepulauan Riau

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
						Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						2020	2021	Target	Rp												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Frekuensi pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	n/a	12	12	4,253,000,000	12	4,407,000,262	12	5,350,000,000	12	5,850,934,051	12	6,543,571,415	12	6,543,571,415	Biro Humas Protokol Penghubung	Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Frekuensi penyediaan peralatan rumah tangga	Bulan	n/a	12	12	225,000,000	12	225,000,000	12	250,000,000	12	300,000,000	12	350,000,000	12	350,000,000	Biro Humas Protokol Penghubung	Provinsi Kepulauan Riau
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Frekuensi Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bulan	n/a	12	12	602,400,000	12	606,400,262	12	700,000,000	12	750,934,051	12	793,571,415	12	793,571,415	Biro Humas Protokol Penghubung	Provinsi Kepulauan Riau
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Frekuensi Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bulan	n/a	12	12	1,350,000,000	12	1,400,000,000	12	1,750,000,000	12	1,900,000,000	12	2,200,000,000	12	2,200,000,000	Biro Humas Protokol Penghubung	Provinsi Kepulauan Riau
			Penyediaan Bahan/Material	Frekuensi pemenuhan bahan material	Bulan	n/a	12	12	375,600,000	12	375,600,000	12	450,000,000	12	500,000,000	12	600,000,000	12	600,000,000	Biro Humas Protokol Penghubung	Provinsi Kepulauan Riau
			Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi Rapat, Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan	n/a	12	12	1,700,000,000	12	1,800,000,000	12	2,200,000,000	12	2,400,000,000	12	2,600,000,000	12	2,600,000,000	Biro Humas Protokol Penghubung	Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	n/a	0	23	1,340,865,500	27	1,500,000,000	26	1,100,000,000	26	1,233,000,000	28	1,700,000,000	28	1,700,000,000	Biro Humas Protokol Penghubung	Provinsi Kepulauan Riau
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan	Unit	n/a	n/a	3	900,000,000	2	1,000,000,000	1	500,000,000	0	-	3	900,000,000	3	900,000,000	Biro Humas Protokol Penghubung	Provinsi Kepulauan Riau
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	Unit	n/a	n/a	0	-	0	-	0	-	1	500,000,000	0	-	0	-	Biro Humas Protokol Penghubung	Provinsi Kepulauan Riau
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Unit	n/a	n/a	20	440,865,500	25	500,000,000	25	600,000,000	25	733,000,000	25	800,000,000	25	800,000,000	Biro Humas Protokol Penghubung	Provinsi Kepulauan Riau
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Frekuensi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	n/a	12	12	6,553,315,500	12	6,585,375,500	12	6,790,000,000	12	6,900,000,000	12	7,050,000,000	12	7,050,000,000	Biro Humas Protokol Penghubung	Provinsi Kepulauan Riau
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Frekuensi Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan	n/a	12	12	70,000,000	12	70,000,000	12	90,000,000	12	100,000,000	12	125,000,000	12	125,000,000	Biro Humas Protokol Penghubung	Provinsi Kepulauan Riau
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Frekuensi Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	n/a	12	12	529,341,500	12	529,341,500	12	550,000,000	12	550,000,000	12	575,000,000	12	575,000,000	Biro Humas Protokol Penghubung	Provinsi Kepulauan Riau
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Frekuensi Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	n/a	12	12	217,940,000	12	250,000,000	12	300,000,000	12	350,000,000	12	400,000,000	12	400,000,000	Biro Humas Protokol Penghubung	Provinsi Kepulauan Riau
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Frekuensi Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	n/a	12	12	5,736,034,000	12	5,736,034,000	12	5,850,000,000	12	5,900,000,000	12	5,950,000,000	12	5,950,000,000	Biro Humas Protokol Penghubung	Provinsi Kepulauan Riau
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Frekuensi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Bulan	n/a	12	12	735,000,000	12	750,000,000	12	836,074,935	12	875,000,000	12	955,000,000	12	955,000,000	Biro Humas Protokol Penghubung	Provinsi Kepulauan Riau
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Frekuensi Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	n/a	n/a	12	300,000,000	12	300,000,000	12	350,000,000	12	350,000,000	12	400,000,000	12	400,000,000	Biro Humas Protokol Penghubung	Provinsi Kepulauan Riau

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif																Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD					
						2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
Kepulauan Riau yang difasilitasi		Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Frekuensi pelaksanaan pelayanan penghubung	Bulan	n/a	12	12	1,296,823,892	12	1,896,823,892	12	2,041,823,892	12	2,186,665,087	12	2,311,573,258	12	2,311,573,258	Biro Humas Protokol Penghubung	Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau			
		Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Frekuensi Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Bulan	n/a	12	12	744,908,092	12	1,050,000,000	12	1,150,000,000	12	1,250,000,000	12	1,320,000,000	12	1,320,000,000	Biro Humas Protokol Penghubung	Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau			
		Peningkalan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Frekuensi Peningkalan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Bulan	n/a	12	12	113,240,000	12	106,823,892	12	136,823,892	12	161,665,087	12	191,573,258	12	191,573,258	Biro Humas Protokol Penghubung	Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Frekuensi Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Bulan	n/a	12	12	438,675,800	12	740,000,000	12	755,000,000	12	775,000,000	12	800,000,000	12	800,000,000	Biro Humas Protokol Penghubung	Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau			
								28,018,183,247		29,164,199,654		31,392,898,827			33,755,599,138		36,315,144,673		158,646,025,539				

TABEL 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Biro Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2021 - 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi		
						Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						2020	2021	Target	Rp												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Terwujudnya Pembinaan Keagamaan, Pelestarian Budaya, dan Harmoni Masyarakat	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan peningkatan kesejahteraan rakyat yang dihasilkan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Program Penunjang Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang dihasilkan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	85	85	86	1,622,451,073	87	1,758,357,355	88	1,904,212,513	89	2,025,772,664	90	2,173,851,387	90	2,173,851,387	Biro Kesejahteraan Rakyat	Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	n/a	1	1	40,448,500	1	110,000,000	1	110,000,000	1	110,000,000	1	110,000,000	1	110,000,000	Biro Kesejahteraan Rakyat	Provinsi Kepulauan Riau
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	Dokumen	n/a	1	1	40,448,500	1	80,000,000	1	80,000,000	1	80,000,000	1	80,000,000	1	80,000,000	Biro Kesejahteraan Rakyat	Provinsi Kepulauan Riau
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	Dokumen	n/a	1	0	-	1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	Biro Kesejahteraan Rakyat	Provinsi Kepulauan Riau
			Administrasi Kepegawai Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawai Perangkat Daerah	%	85	85	86	40,000,000	87	230,000,000	88	150,000,000	89	230,000,000	90	150,000,000	90	150,000,000	Biro Kesejahteraan Rakyat	Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkappannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkappannya	Stel	n/a	n/a	40	40,000,000	80	80,000,000	0	-	80	80,000,000	0	-	0	-	Biro Kesejahteraan Rakyat	Provinsi Kepulauan Riau
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan	Orang	n/a	n/a	0	-	28	150,000,000	28	150,000,000	28	150,000,000	28	150,000,000	28	150,000,000	Biro Kesejahteraan Rakyat	Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Frekuensi pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	n/a	12	12	406,853,700	12	618,357,355	12	625,212,513	12	775,772,664	12	793,851,387	12	793,851,387	Biro Kesejahteraan Rakyat	Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Frekuensi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	n/a	n/a	0	-	12	40,000,000	12	45,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000	Biro Kesejahteraan Rakyat	Provinsi Kepulauan Riau
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Frekuensi Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bulan	n/a	12	12	46,715,300	12	78,357,355	12	80,212,513	12	100,772,664	12	108,851,387	12	108,851,387	Biro Kesejahteraan Rakyat	Provinsi Kepulauan Riau
Pengadaan Barang dan Jasa	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Frekuensi Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Frekuensi Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	n/a	12	0	-	12	50,000,000	12	50,000,000	12	50,000,000	12	50,000,000	12	50,000,000	Biro Kesejahteraan Rakyat	Provinsi Kepulauan Riau
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Daerah	Frekuensi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Bulan	n/a	12	12	360,138,400	12	450,000,000	12	450,000,000	12	525,000,000	12	535,000,000	12	535,000,000	Biro Kesejahteraan Rakyat	Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	n/a	n/a	5	270,000,000	12	50,000,000	13	290,000,000	0	110,000,000	2	420,000,000	2	420,000,000	Biro Kesejahteraan Rakyat	Provinsi Kepulauan Riau
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	Unit	n/a	n/a	1	210,000,000	0	-	1	210,000,000	0	-	2	420,000,000	2	420,000,000	Biro Kesejahteraan Rakyat	Provinsi Kepulauan Riau
			Pengadaan Kebutuhan Kantor dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Kebutuhan Kantor dan Perlengkapan Kantor	Unit	n/a	n/a	1	210,000,000	0	-	1	210,000,000	0	-	2	420,000,000	2	420,000,000	Biro Kesejahteraan Rakyat	Provinsi Kepulauan Riau

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD					
							2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
									56,986,698,664		60,027,835,563		62,303,139,231		68,212,492,803		74,904,447,074		322,434,613,335			



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran atas keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja sesuai dengan bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah. Indikator kinerja dapat dalam bentuk kuantitatif maupun kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian suatu tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi. Untuk itu indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah selesaiya kegiatan. Bertujuan untuk melakukan evaluasi apakah kegiatan bersangkutan memberikan manfaat terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan organisasi.

A. INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Perlu dicantumkannya indikator kinerja Perangkat Daerah mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD, pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan dan memastikan agar setiap tujuan, sasaran, indikator dan target kinerja yang tertuang dalam RPJMD ditindaklanjuti atau terakomodir di dalam tiap-tiap Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sehingga terwujud keselarasan antara dokumen RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah.

Indikator kinerja Perangkat Daerah mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD, merupakan hal yang perlu diprioritaskan oleh setiap Perangkat Daerah mengingat hal tersebut terkait langsung dengan pencapaian Tujuan dan Sasaran Gubernur yang telah dituangkan dalam RPJMD.

Indikator Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026 yang berisikan indikator kinerja, kondisi kinerja pada



awal periode RPJMD, target capaian setiap tahun dan kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD selanjutnya diuraikan sebagaimana berikut melalui tabel 7.1:

Tabel 7.1

**Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang Mengacu
Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Kepulauan Riau 2021–2026**

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Proyeksi Tahun Berjalan	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1.	Persentase Peningkatan PAD	-8,85	-1,22	5,59	5,24	5,53	5,53	5,91	5,91	
2.	Indeks Reformasi Birokrasi	68,57	69,17	69,77	70,37	70,97	71,57	72,17	72,17	
3.	Indeks Kerukunan Umat Beragama	N/A	73,00	74,46	75,95	77,43	79,02	80,60	80,60	

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi / instansi pemerintah daerah (Peraturan Menteri PANRB Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007). Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Tujuan dari ditetapkannya indikator kinerja utama bagi setiap instansi pemerintah adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.



Dengan ditetapkannya indikator kinerja utama, instansi pemerintah dapat menggunakannya untuk beberapa dokumen, antara lain yaitu perencanaan jangka menengah, perencanaan tahunan, perencanaan anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja evaluasi kinerja instansi pemerintah, pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan/sub kegiatan.



Tabel 7.2
Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau
2021–2026

No.	Indikator Kinerja Utama	Formula Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra	Proyeksi Tahun Berjalan	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
1.	Skor Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi (LPPD)	Skor yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri atas LPPD	Skor	3,0221	3,0221	3,03	3,04	3,04	3,05	3,06	3,06	
2.	Percentase Program Kegiatan Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan yang Terealisasi	Jumlah lokpri dalam rencana induk pengelolaan perbatasan yang terealisasi dibagi total lokpri dalam rencana pengelolaan perbatasan dikali 100	%	n/a	n/a	35	45	55	75	90	90	



No.	Indikator Kinerja Utama	Formula Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra	Proyeksi Tahun Berjalan	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
3.	Persentase produk hukum daerah yang terselesaikan	Jumlah Produk Hukum Daerah yang diselesaikan dibagi Jumlah Produk Hukum Daerah yang direncanakan dikali 100	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4.	Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan yang disusun secara aktual	Kebijakan administrasi pembangunan yang disusun secara aktual dibagi seluruh kebijakan pembangunan yang disusun dikali 100	%	85	88	90	92	95	97	100	100	
5.	Persentase rekomendasi dan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	Rekomendasi dan Kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti dibagi rekomendasi dan kebijakan bidang perekonomian yang telah disusun dikali 100	%	n/a	90	90	92	93	95	100	100	
6.	Persentase jumlah pengadaan yang	Jumlah pengadaan barang/jasa yang	%	8,00	8,1	8,2	8,3	8,4	8,5	8,6	8,6	



No.	Indikator Kinerja Utama	Formula Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra	Proyeksi Tahun Berjalan	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	dilakukan dengan metode kompetitif	dilakukan dengan metode kompetitif dibagi jumlah pengadaan barang/jasa yang dilakukan tanpa metode kompetitif dikali 100										
7.	Tingkat Kematangan Perangkat Daerah	Total nilai PD yg tepat fungsi dan tepat ukur kelembagaannya dibagi jumlah seluruh PD dikali 100	Skor	n/a	37,10	38,60	40,10	41,60	43,10	44,60	44,60	
8.	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Persentase kelancaran pelayanan administrasi kantor berdasarkan pendanaan yang ada dibagi pendanaan yang dibutuhkan dikali 100	%	85	85	86	87	88	89	90	90	
9.	Persentase Kegiatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di	Jumlah kegiatan Pemerintah Provinsi Kepri di luar wilayah	%	85	85	86	87	88	89	90	90	



No.	Indikator Kinerja Utama	Formula Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra	Proyeksi Tahun Berjalan	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	luar wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang difasilitasi	Provinsi Kepri yang difasilitasi dibagi jumlah seluruh kegiatan Pemerintah Provinsi Kepri di luar wilayah Provinsi Kepri dikali 100										
10.	Persentase Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang dihasilkan	Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang dihasilkan dibagi Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang direncanakan dikali 100	%	n/a	n/a	20	40	60	80	100	100	



BAB VIII

PENUTUP

Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 ini disusun untuk meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah sebagai unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi dalam kerangka pencapaian visi dan misi Provinsi Kepulauan Riau yang telah disusun dan disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Permerintahan Daerah yaitu RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026.

Sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Provinsi Kepulauan Riau. Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Karena itu Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau sesuai target kinerja sasaran yang akan dicapai.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang dijabarkan dalam Renja dan RKA harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang selanjutnya akan menjadi bukti pencapaian kinerja.

Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau periode 2021-2026 ini juga harus dijadikan acuan kerja bagi seluruh biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing biro. Semua biro juga diharapkan dapat melaksanakan program dan kegiatan/sub kegiatan secara bertanggungjawab yang berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga dan peningkatan kinerja pegawai sehingga target kinerja yang ditetapkan dapat diwujudkan.



Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang telah diprogramkan, dapat dilakukan melalui regulasi, forum koordinasi dan musyawarah pembangunan. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau wajib menerapkan prinsip-prinsip tata pengelolaan pemerintahan yang baik antara lain: prinsip-prinsip efisien, efektivitas, transparasi, akuntabilitas dan partisipasi dalam melaksanakan kegiatan dalam rangka pencapaian visi, misi, dan arah pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026.

A. PEDOMAN TRANSISI

RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026 berlaku untuk kurun waktu lima tahun yang dimulai sejak tahun awal pelaksanaan 2022 hingga tahun 2026 begitu juga dengan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Periode RPJMD sebelumnya maupun periode Renstra sebelumnya adalah tahun 2016-2021. Oleh karena itu tahun 2021 merupakan tahun transisi dimana indikator pada tahun 2021 masih menggunakan indikator yang tercantum dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2021-2026). Sehingga data capaian kinerja tahun 2021 tidak sesuai dengan indikator kinerja baru yang akan dicantumkan dalam dokumen perencanaan yang baru. Hal ini mengakibatkan banyak data pada tahun 2021 yang tidak bisa disandingkan atau tidak tersedia (*not available*).

Pada tahun 2024 nanti akan dilakukan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kembali secara serentak di seluruh Indonesia. Oleh karena itu nantinya RPJMD maupun Renstra tahun 2021-2026 tetap menjadi pedoman Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau terpilih dalam menyusun visi, misi maupun program/kegiatan di sisa akhir tahun perencanaan.

Berikutnya untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan perencanaan setelah RPJMD tahun 2021-2026 berakhir, maka RPJMD dan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau ini menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama dokumen perencanaan periode berikutnya.



B. KAIDAH PELAKSANAAN

Dokumen Renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau kurun waktu tahun 2022 sampai dengan tahun 2026. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau ini memiliki kedudukan yang sangat vital dan penting dalam menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang bersih, kuat dan antisipatif selama 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dengan memberikan arah, tujuan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
2. Penyusunan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan pada awal tahun 2021 setelah Kepala Daerah terpilih dilantik, oleh karena itu Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau juga dilaksanakan penyusunannya bersamaan dengan penyusunan RPJMD. Di tahun yang sama pada pertengahan tahun juga dilaksanakan penyusunan RKPD sebagai dasar penyusunan Rencana APBD Tahun Anggaran 2022. Namun terjadi perbedaan asumsi kerangka pendanaan dan belanja antara dokumen RKPD dengan RPJMD yang menyebabkan perbedaan pagu belanja di seluruh SKPD termasuk di Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2022. Hal ini disebabkan adanya perubahan regulasi dari Pemerintah Pusat maupun realisasi dalam penerimaan pendapatan sehingga mempengaruhi besaran belanja.
3. Seluruh Biro dibawah lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam kurun waktu tahun 2022 sampai dengan tahun 2026 sesuai dokumen ini dengan sebaik-baiknya;
4. Seluruh Biro dibawah lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau berkewajiban untuk menyusun rencana kerja dan anggaran sesuai dengan tugas



dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada dokumen Renstra ini serta RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026;

5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026, seluruh biro juga diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja Tahunan masing-masing biro.

Dokumen ini merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan tupoksi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Penyusunan dokumen ini masih terdapat berbagai kekurangan, namun demikian evaluasi, revisi dan koreksi tetap diperlukan serta harus menjadi perhatian agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat segera direalisasikan. Masih terdapat kelemahan di beberapa sisi dalam kesamaan persepsi di seluruh biro dalam hal konsep perencanaan, akan tetapi tidak mengurangi semangat dari tim penyusun dalam hal perbaikan kedepannya.

Kepada semua pihak yang terlibat dan memberikan konstribusi dalam penyusunan dokumen Renstra ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi dan kerja kerasnya.

Tanjungpinang, Juli 2022

KEPALA BIRO UMUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

ABDULLAH, S. Sos., M. H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19701210 199303 1 004